



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
(BPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



# Kata Pengantar



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Provinsi Tenggara Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan teknis yang dihadapi adalah masa transisi kepemimpinan sehingga kebijakan pendidikan tidak menjadi prioritas dari pemerintah daerah. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Provinsi Pendidikan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kupang, 30 Januari 2025  
Kepala BPMP Provinsi NTT



Herdiana, S.T.,MBA  
NIP. 197612062008101001

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	2
B. Dasar Hukum .....	5
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	6
D. Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis .....	11
B. Program Prioritas .....	14
C. Rencana Kerja dan Anggaran .....	19
D. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Realisasi Program/Agenda Prioritas .....	107
C. Realisasi Anggaran .....	109
D. Kinerja Lain-lain .....	101
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
Lampiran	
Ø Perjanjian Kinerja	
Ø Pengukuran Kinerja	
Ø Pernyataan telah direviu	
Ø SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024	
Ø SK Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024	

# Ikhtisar Eksekutif

Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

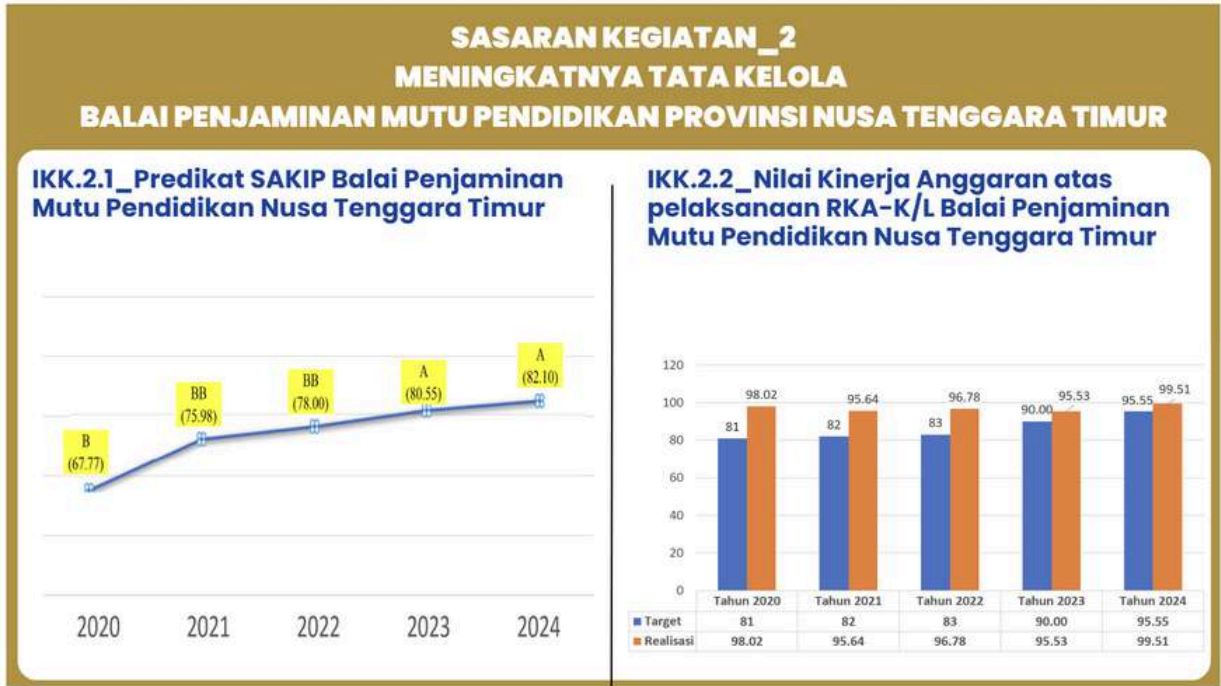
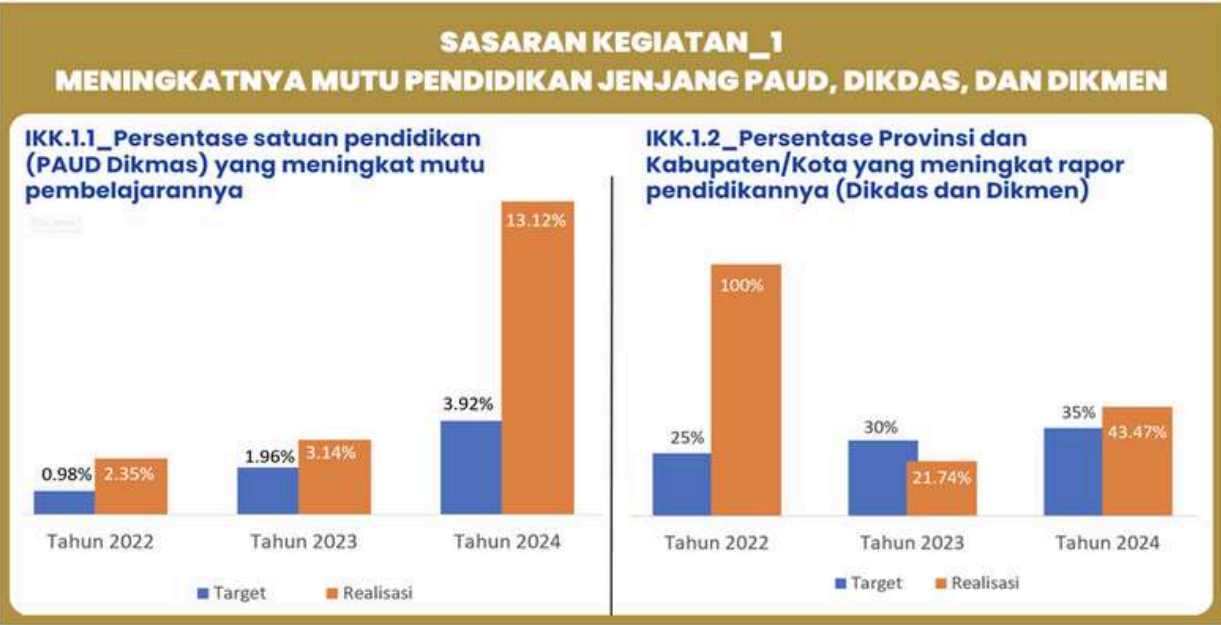
Anggaran yang dialokasikan pemerintah dari APBN untuk BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar Rp. 39.524.039.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Berikut trend alokasi anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2020 sampai 2024



Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target kinerja sasaran kegiatan program prioritas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Pengawas Pendamping PSP masih perlu penguatan program dalam menganalisis hasil rapor pendidikan karena masih ada sekolah PSP yang belum bisa membaca Rapor Pendidikan;
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemda sehingga kurang penyedia lokal di SIPLah mengakibatkan harga masih mahal dan sekolah masih terbawa kebiasaan lama membuat perencanaan di tahun berjalan;
3. Banyak sekolah penerima bantuan Chromebook yang memanfaatkan perangkat Chromebook hanya untuk pelaksanaan ANBK;
4. Masih terdapat satuan pendidikan (PPDB) yang menerima siswa melebihi daya tampung;
5. Sosialisasi tentang AN dan Sulingjar oleh Dinas Pendidikan kurang masif sehingga pemahaman satuan pendidikan tentang AN dan sulingjar masih kurang;
6. Penggunaan media sosial seperti Instagram dan tiktok bagi target audiens seperti masyarakat umum, pemangku kebijakan, dan tenaga pendidik di NTT kurang diminati sehingga ketersampaian informasinya tidak merata;
7. Tidak semua Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda Paud melakukan advokasi Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan secara maksimal sehingga masih ada sekolah yang melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 3 hari tanpa melakukan Asesmen awal;
8. Jarak dan lokasi sekolah penugasan bagi mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 belum sesuai dengan domisili;
9. Pemahaman Dinas Pendidikan kurang dalam menindaklanjuti hasil advokasi dan SE Gerakan Sekolah sehat yang telah diterbitkan;
10. Komitmen Pemda dalam implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif tidak optimal karena tidak didukung regulasi;
11. Pergantian operator satuan pendidikan mempengaruhi kualitas pengisian data yang benar dan sesuai pada Dapodik

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi antara Tim PMO UPT dengan Disdik Kab/Kota/Provinsi untuk pelaksanaan pendampingan PSP antar BPMP dengan BGP serta dengan PDM lainnya;
2. Melakukan webinar SIPLah dan Dana BOSP secara berkala dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Pengawas dan SIAR;
3. PemanTIK (Pendamping Pemanfaatan TIK) yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berperan mendorong satuan pendidikan agar maksimal dalam menerapkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran;
4. Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan tentang AN dan Sulingjar harus lebih masif sehingga satpen mendapatkan informasi terupdate;
5. Sosialisasi, advokasi dan bimtek dilakukan untuk memasifkan program Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan (TPSDYM) dan mendampingi satuan pendidikan dalam menerapkan TPSDYM;
6. Berkoordinasi bersama dengan PIC pemulihan pembelajaran dengan mengajak fasilitator daerah untuk melaksanakan aksi nyata penguatan literasi dan numerasi;
7. Menjalin Kolaborasi antara BPMP NTT, Dinas Pendidikan untuk peningkatan status kesehatan sekolah dan peserta didik dan Menyamakan persepsi antara sekolah, orangtua dan komite untuk perubahan positif perilaku hidup sehat di satuan pendidikan;
8. Pelatihan mandiri Pendidikan Berjenjang pendidikan inklusif (tingkat dasar) melalui PMM bukan hanya guru/tendik sekolah inklusif tetapi guru/tendik dari sekolah yang tidak ada siswa inklusifnya juga mengikuti pelatihan;
9. BPMP sebagai UPT Pusat yang menjadi mitra dari Dinas Pendidikan dapat melakukan pendampingan dan membantu Operator sekolah agar memahami dengan baik dan Benar terkait Kualitas Dapodik



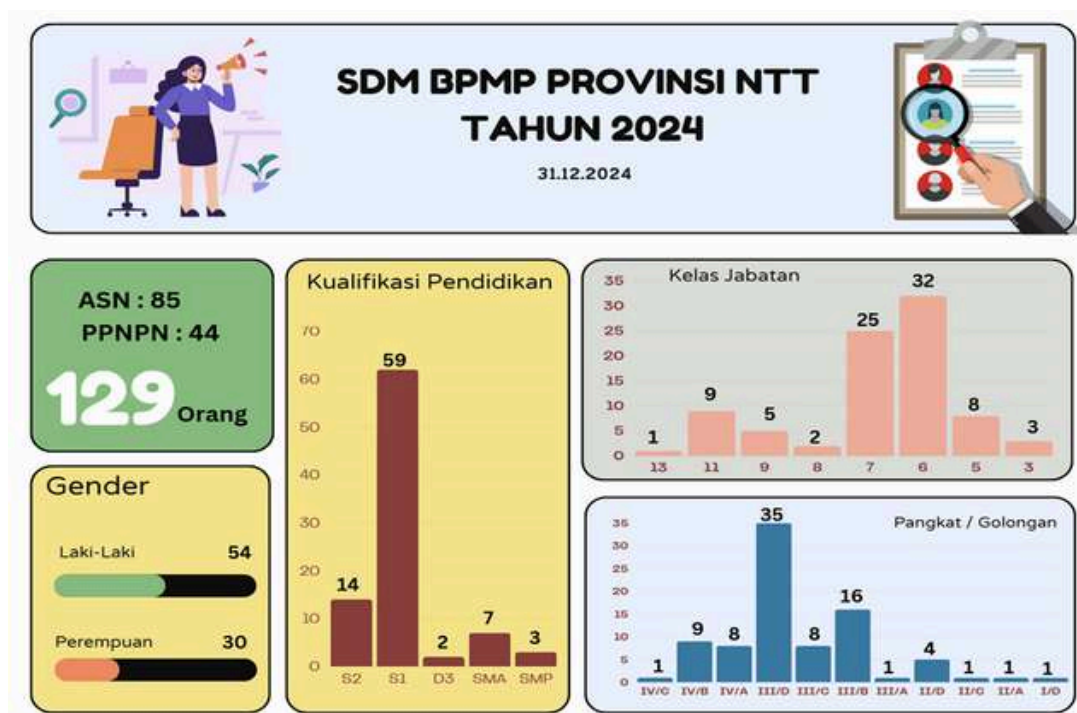


**BABI**

**PENDAHULUAN**

## A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Berikut Transformasi Kelembagaan BPMP Provinsi NTT.



## ASN dan PPNP



## Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut ini peta Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Sumber Data: [tentangflobamorata.blogspot.com](http://tentangflobamorata.blogspot.com)

### Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kode Kab	Nama Kabupaten/Kota	Ibu Kota
1	2401	Kab. Kupang	Oelamasi
2	2403	Kab. Timor Tengah Selatan	So'E
3	2404	Kab. Timor Tengah Utara	Kefamenanu
4	2405	Kab. Belu	Atambua
5	2406	Kab. Alor	Kalabahi
6	2407	Kab. Flores Timur	Larantuka
7	2408	Kab. Sikka	Maumere

No	Kode Kab	Nama Kabupaten/Kota	Ibu Kota
8	2409	Kab. Ende	Ende
9	2410	Kab. Ngada	Bajawa
10	2411	Kab. Manggarai	Ruteng
11	2412	Kab. Sumba Timur	Waingapu
12	2413	Kab. Sumba Barat	Waikabubak
13	2414	Kab. Lembata	Lewoleba
14	2415	Kab. Rote Ndao	Ba'A

No	Kode Kab	Nama Kabupaten/Kota	Ibu Kota
15	2416	Kab. Manggarai Barat	Labuan Bajo
16	2417	Kab. Nagekeo	Mbay
17	2418	Kab. Sumba Tengah	Waibakul
18	2419	Kab. Sumba Barat Daya	Tambolaka
19	2420	Kab. Manggarai Timur	Borong
20	2421	Kab. Sabu Raijua	Seba
21	2422	Kab. Malaka	Betun
22	2460	Kota Kupang	Kupang

## B. Dasar Hukum

# DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PemenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja



Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek

Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan



Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024 edisi Juli 2023

DIPA BPMP Provinsi NTT tahun anggaran 2023 : SP DIPA-023.03.2.419546/2023 tanggal 30 November 2022

## C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi



## Struktur Organisasi

Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala dengan pangkat eselon III, dibantu Kepala Sub Bagian Umum dengan pangkat eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Widyaprada.



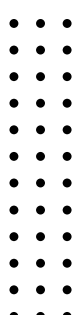
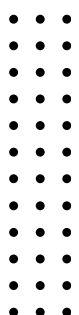
## D. Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

### Struktur Organisasi

1. Kurang optimalnya Tim PMO daerah di Kabupaten/Kota;
2. Masih banyaknya persoalan pendidikan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai pada satuan pendidikan;
3. Kurang optimalnya Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi Data Pokok Pendidikan;
4. Masih banyak miskonsepsi terhadap Kebijakan Merdeka Belajar;
5. Sering terjadi mutasi pejabat di daerah yang menyebabkan advokasi kebijakan tidak berjalan maksimal
6. Kemitraan dengan Pemda dan Mitra Pembangunan
7. Kinerja dan budaya mutu lembaga harus ditingkatkan.

### Peran Strategis

1. Memaksimalkan peran Tim PMO daerah dan pengawas pendamping PSP;
2. Terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan meningkatkan kemampuan digital pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Terus melakukan koordinasi antara satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan untuk memahami pengisian Data Pokok Pendidikan;
4. Melakukan Advokasi ke Daerah dan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tentang Kebijakan Merdeka Belajar;
5. Terus melakukan advokasi terkait kebijakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah
6. Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dengan Pemda dan Mitra Pembangunan
7. Meningkatkan kinerja dan menanamkan budaya mutu kepada seluruh pegawai baik ASN maupun PNPB BPMP Provinsi NTT



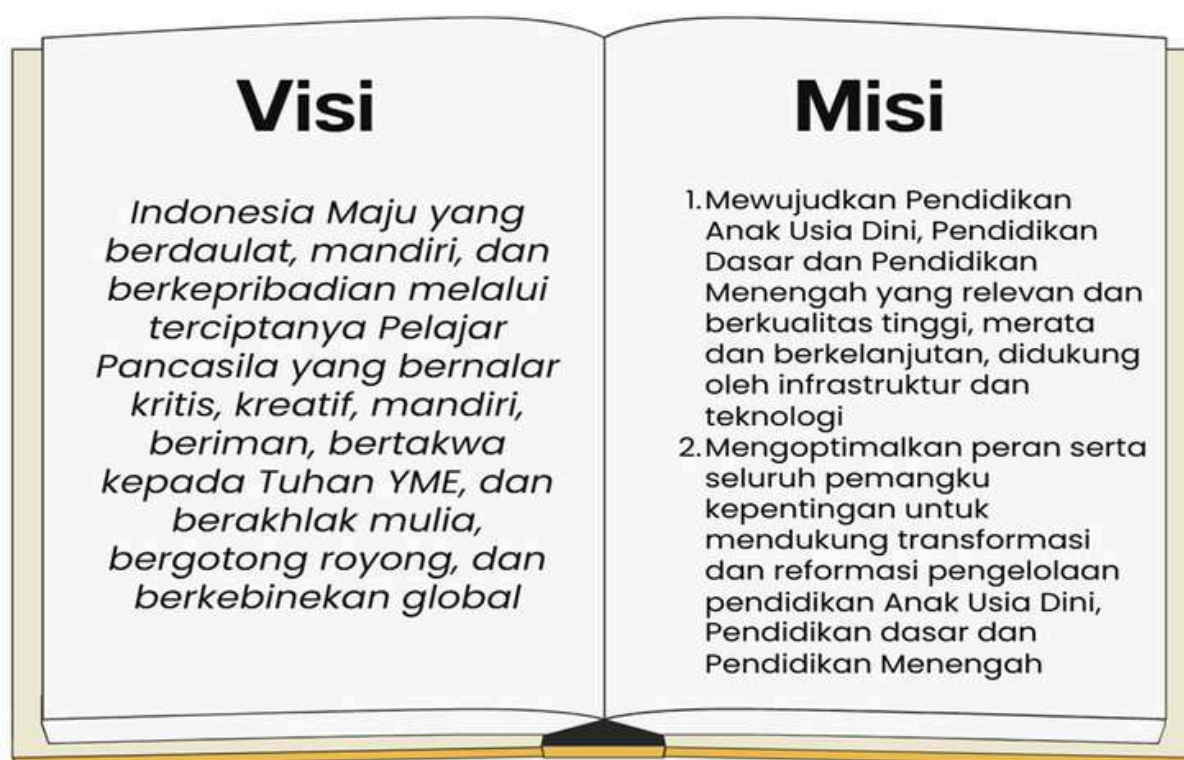


## BAB II

# PERJANJIAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD, Dikdas dan Dikmen) yang mengemban tugas peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur menentukan visi berdasarkan visi Kemdikbudristek, mendukung visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai wujud dukungan visi dan misi unit kerja atasannya. Adapun Visi dan Misi Kemendikbudristek 2020-2024 adalah mewujudkan:



## Tujuan Strategis

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target		
			2022	2023	2024
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	25	50	75
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi NTT	Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTT	BB	A	A

## Matriks Kinerja 2020-2021

Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (%)	
	2020	2021
<b>SK.1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>		
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah ( <i>score card</i> ) minimal 75	26,5	27,4
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5
IKK 1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95	95,2
<b>SK.2 Meningkatnya Tata kelola LPMP yang baik</b>		
IKK 2.1 Predikat SAKIP LPMP NTT	BB	BB
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L LPMP NTT	81	82

## Matriks Kinerja 2022-2024

Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target (%)		
		PK 2022	PK 2023	PK 2024
<b>SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>				
<b>IKK 1.1</b>	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98	1,96	3,92
<b>IKK 1.2</b>	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	30	35
<b>SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Nusa Tenggara Timur</b>				
<b>IKK 2.1</b>	Predikat SAKIP BPMP NTT	BB	A	A
<b>IKK 2.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP NTT	83	90	95,55

## B. Program Prioritas

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan program prioritas sebagai berikut:

### 01. Program Sekolah Penggerak

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[094] Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak			1.974.897.816.00
PDM-01 Program Sekolah Penggerak			
1	Terjadinya peningkatan minimal 1 tahap dari kondisi awal di atas level yang diharapkan pada sekolah pelaksana PSP angkatan 1 sebesar 100%.		
2	50% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 dan 2 mengalami peningkatan hasil belajar [dimensi A] pada Rapor Pendidikan.		
3	100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan skor rapor pendidikan pada indikator dimensi D dan E		
4	Terjadinya pengimbasan oleh satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 terhadap 5.000 satuan pendidikan.		
5	35% Pemda (peningkatan 10% dari tahun 2023) pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.		

## 02. Implementasi Kurikulum Merdeka

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[091] Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka			2.208.015.006
PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka			
1	Peningkatan kualitas progres belajar di PMM oleh satuan pendidikan pelaksana IKM dengan indikator baik menjadi 50%		
2	Peningkatan kualitas pemanfaatan perangkat ajar di PMM oleh satuan pendidikan pelaksana IKM dengan indikator baik menjadi 75%.		
3	75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik		
4	Persepsi XX % orang tua terhadap IKM bernilai positif.		
5	Sekolah IKM mandiri yang mengikuti pendampingan IKM untuk tahun ajaran baru, berdasarkan hasil refleksi tahun ajaran 2023/2024 sebesar 50%		

## 03. Transformasi Digital

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[097] Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah			3.422.768.399
PDM-03A Sumber Daya Sekolah (SDS)			
1	90% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLAH		
2	50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan SIPLAH		
3	80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan		
4	Rata-rata 90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu/masuk penyaluran gelombang I [baseline: rata-rata tahap I sebesar 47%, rata-rata tahap II sebesar 85%]		
5	100% satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1		
6	50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1		
PDM-03B Optimalisasi Chromebook & Belajar.id			
1	Meningkatkan aktivasi akun belajar.id dari 72,96% menjadi 100% diluar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan		
2	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat		
3	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK		
4	Adopsi GWfE (Google Workspace for Education)		
PDM-14 Analisis Data Pendidikan			
1	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)		

## 04. Perencanaan Berbasis Data

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[095] Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data			1.995.614.127
PDM-04 Rapor Pendidikan dan PBD Satuan Pendidikan			
1	PAUD - 90% Login, PAUD - 80% Unduh/ Eksplorasi, PAUD - 60% Perencanaan, PAUD - 50% Pelaksanaan		
2	Dasmen - 100% Login, Dasmen - 100% Unduh/ Eksplorasi, Dasmen - 80% Perencanaan, Dasmen - 70% Pelaksanaan, Dasmen - 90% Delta Positif		
3	SLB - 100% Login, SLB - 100% Unduh/ Eksplorasi, SLB - 80% Perencanaan, SLB - 70% Pelaksanaan, SLB - 65% Delta Positif		
4	SKB - 100% Login, SKB - 90% Unduh/ Eksplorasi, SKB - 70% Perencanaan, SKB - 60% Pelaksanaan, SKB- 70% Delta Positif		
5	PKBM - 80% Login, PKBM - 70% Unduh/ Eksplorasi, PKBM - 50% Perencanaan, PKBM - 40% Pelaksanaan, PKBM - 70% Delta Positif		
PDM-04B Rapor Pendidikan dan PBD Pemda			
1	70% Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui indikator prioritas SPM Pendidikan		
2	70% Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan		
3	50% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya		

## 05. Kemitraan Daerah

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[096] Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan			2.647.033.183
PDM-05 Kemitraan Daerah			
1	20% dari kebutuhan Kepala Sekolah diangkat dari Guru Penggerak ditahun 2024		
2	50% dari kebutuhan Pengawas Sekolah diangkat dari Guru Penggerak ditahun 2024		
3	90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024		
4	100% Pemda mempunyai satgas PPKSP		
5	100% Satpen mempunyai tim PPKSP		

## 06. Asesmen Nasional

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[092] Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional			806.024.355
PDM-06 Asesmen Nasional			
1	Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%		
2	Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Ujian Kesetaraan [UK] sebesar 30%.		
3	Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN Tahun 2024 sebesar 50%.		
4	Menurunkan Partisipasi satuan yang belum memadai AN dan belum mengikuti Sulingjar Tahun 2024 sebesar 50%		
5	Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%		

## 07. Publikasi dan Komunikasi

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[112] Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi			282.283.419
PDM-07 Publikasi dan Komunikasi			
Tidak ada target objective			

## 08. Regulasi dan Tata Kelola

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[093] Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah			37.410.000
PDM-08 Regulasi dan Tata Kelola			
1	65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%		
2	80% Kab/Kota dengan APS 7-12 tahun >99%		
3	70% Kab/Kota dengan APS 13-15 tahun >95%		
4	30% Prov dengan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat >95%		
5	65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%		

## 09 Transisi PAUD ke SD

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[114] Pelaksanaan Transisi PAUD-SD			378.586.010
PDM-09 Transisi PAUD ke SD			
1	100% SD Negeri tidak melakukan tes calistung saat PPDB		
2	25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB		
3	50% Guru SD kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan Calistung peserta didik		
4	50% satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan Fondasi		
5	50 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan Fondasi		
6	50 % Satuan Paud dan 70 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS		
7	70 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS		

## 10. Pemulihan Pembelajaran

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[115] Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran			1.369.786.290
PDM-10 Pemulihan Pembelajaran			
1	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kesetaraan dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran (melalui penguatan literasi)		
2	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kesetaraan dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran (melalui penguatan numerasi)		
3	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi		

## 11. Gerakan Sekolah Sehat

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[116] Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat			1.178.464.602
PDM-11 Gerakan Sekolah Sehat			
1	80% Satuan Pendidikan di Indonesia Mengetahui Gerakan Sekolah Sehat		
2	90% Satuan Pendidikan Mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa		
3	95% satuan pendidikan binaan dengan status kuning meningkat kategori status kesehatannya menjadi hijau di tahun 2024 untuk sehat Bergizi, sehat fisik dan sehat imunisasi		
4	95% satuan pendidikan binaan dengan status merah meningkat kategori status kesehatannya menjadi kuning di tahun 2024 untuk sehat lingkungan dan sehat jiwa		
5	100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB terpetakan status kebugarannya		

## 12. Pendidikan Inklusif

No	Nama Program Prioritas	Objective/Target 2024	Alokasi Anggaran
[117] Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus			308.973.510
PDM-12 Pendidikan Inklusi			
1	100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.		
2	4743 guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar)		
3	474 Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan)		
4	238 Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)		
5	Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif 1 Provinsi dan 22 Kab/Kota		

## C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:



Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target kinerja sasaran kegiatan program prioritas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) / RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SASARAN KEGIATAN**

propinsi 53-Provinsi Nusa Tenggara Timur

program	sasaran_program	kegiatan	sasaran_kegiatan	Target 2024	Alokasi 2024
023.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33-Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	6397-Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	01-Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	87.481	17.675.901
023.WA-Program Dukungan Manajemen	19-Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	2005-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	01-Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	14	15.654.969
<b>Grand Total</b>				<b>87.495</b>	<b>33.330.870</b>

**RINCIAN KEGIATAN**

propinsi 53-Provinsi Nusa Tenggara Timur

sasaran_kegiatan	kro	ro	komponen	Target 2024	Alokasi 2024		
01-Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	051-Perencanaan Program Dan Anggaran	0	0		
			052-Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	0	0		
			053-Pengelolaan Data Dan Informasi	0	0		
			054-Pengelolaan Kepegawaian	0	0		
			055-Layanan Organisasi Dan Tata Laksana	0	0		
			056-Reformasi Birokrasi	0	0		
			057-Layanan Hukum	0	0		
			058-Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	0	0		
			059-Pengelolaan BMN	0	0		
			060-Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem Pendidikan	0	0		
			061-Publikasi, Komunikasi dan Kehumasan	0	0		
			062-Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	475.000		
			063-Tata Persuratan Dan Kearsipan	0	0		
	994-Layanan Perkantoran	001-Gaji dan Tunjangan	12	9.511.466			
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	5.668.503			
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	995-Kendaraan Bermotor yang Diadakan	0	0		
			996-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	0	0		
			997-Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0		
		971-Layanan Prasarana Internal	998-Pembangunan dan Renovasi Gedung Bangunan	0	0		
Total				14	15.654.969		
01-Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	750-Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	065-Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Berdasarkan SNP	0	0		
			071-Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan	0	0		
			072-Bimbingan Teknis Supervisi	0	0		
			073-Supervisi Satuan Pendidikan	0	0		
			091-Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka	7.678	569.517		
			092-Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional	7.678	543.394		
			093-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah	7.678	539.171		
			094-Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak	7.678	10.766.543		
			095-Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data	7.678	1.713.593		
		850-Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	096-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan	1	666.786		
			097-Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah	7.678	934.898		
			091-Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka	5.916	75.576		
			092-Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional	5.916	7.600		
			093-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah	5.916	41.483		
			094-Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak	5.916	1.443.802		
			095-Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data	5.916	242.692		
			096-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan	5.916	50.560		
			097-Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah	5.916	80.286		
			Total				87.481
Grand Total				87.495	33.330.870		

## D. Perjanjian Kinerja

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

### Perjanjian Kinerja Awal (16 Februari 2024)

Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target (%)
		2024
<b>SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>		
<b>IKK 1.1</b>	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
<b>IKK 1.2</b>	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35.00
<b>SK. 2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
<b>IKK 2.1</b>	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A
<b>IKK 2.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
<b>2005</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.426.788.000
<b>6397</b>	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 18.201.195.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 37.627.983.000</b>

Terdapat perbedaan target PK tahun 2024 dan target renstra 2024 di IKK.2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi NTT di Renstra dengan target 92% sedangkan di target PK sebesar 95.55%, penyebabnya karena capaian IKK.2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi NTT tahun 2023 adalah 95.53% sehingga target PK di tahun 2024 harus lebih besar dari 95.53% menjadi 95.55%.

## Perjanjian Kinerja Akhir (11 November 2024)

Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target (%)
		2024
<b>SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>		
<b>IKK 1.1</b>	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
<b>IKK 1.2</b>	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35.00
<b>SK. 2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
<b>IKK 2.1</b>	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A
<b>IKK 2.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
<b>2005</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 21.759.247.000
<b>6397</b>	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 17.764.792.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 39.524.039.000</b>

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui review rencana strategis

Penyesuaian alokasi anggaran pada perjanjian kinerja awal di tanggal 16 Februari 2024 dari anggaran sebesar Rp.37.627.983.000 menjadi Rp.39.524.039.000 di Perjanjian Kinerja akhir 2024





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan untuk dicapai sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024

### Sasaran Kegiatan\_1

### Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Mutu Pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas (menggunakan data akreditasi sekolah) dan jenjang Dikdas dan Dikmen (menggunakan data indeks capaian Standar Pelayanan Minimal) mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya sebesar 13.14%, nilai presentase ini dapat dilihat dari satuan pendidikan yang meningkat nilai akreditasi sekolah pada tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat nilai akreditasi sekolahnya sebanyak 727 satuan pendidikan dari jumlah keseluruhan 5.542 satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) sebesar 43.47%, nilai indeks capaian SPM di 22 Kab/Kota dan 1 Provinsi yang meningkat Rapor Pendidikannya pada tahun 2024 di bandingkan dengan tahun 2023, Jumlah Kabupaten/Kota/Provinsi yang satuan pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) yang meningkat rapor pendidikannya sebanyak 10 Kab/Kota dari 23 Kab/Kota/ Provinsi. Berikutnya dapat di lihat pada tabel di bawah

Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Tahun 2024		
		Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
<b>SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>				
<b>IKK 1.1</b>	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	13.12	334.69
<b>IKK 1.2</b>	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35	43.47	124.20

Mutu pendidikan jenjang PAUD Dikmas, Dikdas dan Dikmen telah dilaksanakan oleh BPMP Provinsi NTT. Berikut uraian pada masing masing indikator kinerja kegiatan

# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

## PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN (PAUD DIKMAS) YANG MENINGKAT MUTU PEMBELAJARANNYA



### 01. Definisi Operasional

Definisi Operasional IKK 1.1 adalah persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar. Dengan metode perhitungan sebagai berikut

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

PAUD dalam kelembagaannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu PAUD formal atau TK dan PAUD non formal (Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak dan sederajat) antara lain: (1) Taman Kanak-Kanak (TK); (2) Taman Penitipan Anak (TPA); (3) Kelompok Bermain (KB); dan (4) Satuan PAUD Sejenis yang perlu ditingkatkan mutunya. Mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses Pendidikan. Hasil penilaian proses pendidikan dapat dilakukan secara internal melalui evaluasi diri sekolah dan secara eksternal melalui penilaian akreditasi satuan pendidikan.

## 02. Metode Perhitungan

Metode perhitungan IKK 1.1 untuk tahun 2024 belum menggunakan data rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar sebagaimana dijelaskan pada cara perhitungan di atas karena sampai dengan laporan kinerja selesai disusun data rapor pendidikan belum tersedia.

Oleh karena itu, untuk tahun 2024 perhitungan IKK 1.1 menggunakan hasil akreditasi cut off Juni 2023 s.d. Juni 2024, dengan metode perhitungan berdasarkan persentase kenaikan maka diperoleh data mutu pembelajaran berbasis akreditasi sebagai berikut:

<i><b>Kenaikan Akreditasi PAUD Tahun 2024</b></i>				
Kriteria Capaian	A	B	C	Jumlah
C	0	8	0	8
Belum Terakreditasi	0	22	24	46
Tidak diisi	8	269	393	670
Tidak Terakreditasi	0	1	2	3
<b>Jumlah Sekolah</b>	<b>8</b>	<b>300</b>	<b>419</b>	<b>727</b>

Jumlah sekolah jenjang PAUD berdasarkan cut off Juni 2023 s.d. Juni 2024 berjumlah 5.542 sekolah.

Hasil capaian persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD yang mengalami peningkatan mutu pembelajarannya dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &: \frac{\text{Jumlah kenaikan akreditasi}}{\text{Jumlah sekolah}} \times 100 \\ &: \frac{727}{5.542} \times 100 \\ &: 13.12\end{aligned}$$

### 03. Trend Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

Untuk tahun Renstra 2020 dan 2021 sasaran kegiatan berbeda yaitu "Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan" (tabel di pembahasan IKK.2.1).

Di bawah ini trend perbandingan IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dari tahun 2022-2024



#### Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra

Tahun 2023			Tahun 2024			Target Renstra Kemdikbud 2024	% capaian Realisasi terhadap Target Renstra Kemdikbud 2024
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.96	3.14	160.20	3.92	13.12	334.69	3.92	334.69

Berdasarkan hasil akreditasi jenjang PAUD tahun 2024 jumlah sekolah 5.542 sekolah dengan kenaikan hasil akreditasi berjumlah 727 sekolah sehingga realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan 13.12%. Dari data di atas, realisasi IKK 1.1 dapat disimpulkan melebihi target yang ditetapkan 3.92% dengan realisasi sebesar 13.12% dengan persentase capaian sebesar 334.69%.

IKK 1.1 di bandingkan dengan tahun 2023, target yang ditetapkan 1.96% dengan terealisasi sebesar 3.14% dengan persentase capaian sebesar 160.20%.

Untuk mengukur meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan pada jenjang PAUD Dikmas adalah dengan melalui proses Penilaian akreditasi sekolah yang bersumber dari penilaian kinerja sekolah sebesar 85% dan Indikator Pemenuhan Relatif (IPR) sebesar 15%.

Komponen penilaian kinerja sekolah berasal dari komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru dan komponen manajemen sekolah, sedangkan indikator pemenuhan relatif adalah indikator penentuan kelayakan dilakukan melalui kegiatan asesmen kecukupan data isian akreditasi untuk memastikan sekolah memenuhi persyaratan administrasi minimal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam akreditasi

#### 04.

### **Analisis Program dan Kegiatan terkait, yang mendukung perealisasi target indikator kinerja**

Merdeka Belajar Episode 24 Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang dihadirkan Kemendikbudristek, mendapat sambutan positif pasalnya gerakan ini memiliki tujuan utama mulia yang memastikan setiap anak Indonesia nantinya memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning). Kemampuan enam fondasi anak yang melahirkan generasi emas Indonesia 2045 dibangun secara berkesinambungan sejak di PAUD hingga SD Kelas Awal melalui Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, advokasi, pendampingan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk mendorong 22 dinas pendidikan Kabupaten/Kota pada satuan jenjang PAUD dan Jenjang SD di wilayahnya.

## PDM-09

# Gerakan Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan

Adalah Gerakan yang menyelaraskan pembelajaran PAUD ke SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD; dan peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Gerakan ini merupakan upaya untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi dari manapun titik berangkatnya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan memiliki 3 target :

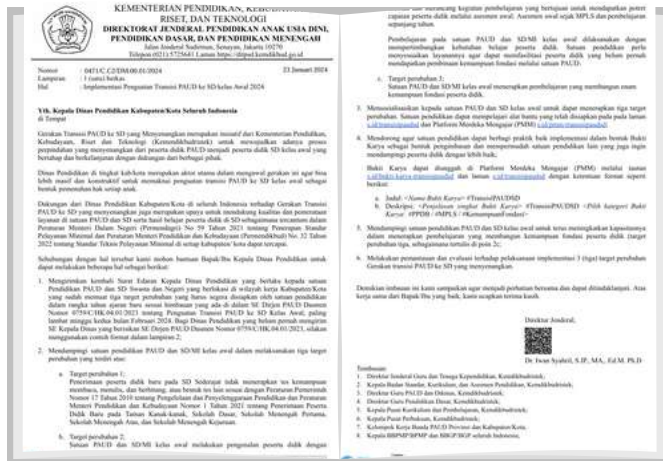
1. Meniadakan Tes Calistung saat PPDB SD
2. Menerapkan MPLS 2 minggu awal pembelajaran di PAUD dan SD
3. Menerapkan Pembelajaran yang menguatkan Kemampuan Fondasi di PAUD ke SD

## Objective, Target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
100% SD Negeri dan 25% SD Swasta tidak melakukan tes Calistung saat PPDB	Negeri : 100% Swasta : 25%	Negeri : 88.34% Swasta : 90.41%	Negeri : 88.34% Swasta : 361.64%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
50% Guru SD kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan Calistung peserta didik	50%	75.13%	150.26%
50% satuan PAUD dan SD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan Fondasi	PAUD : 50% SD : 50%	PAUD : 54% SD : 61%	PAUD : 108% SD : 122%
50 % satuan PAUD dan 70 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	PAUD : 50% SD : 70%	PAUD : 60.70% SD : 71.10%	PAUD : 121.4% SD : 101.57%

# Kegiatan yang mendukung ketercapaian target



01.

Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB dan Diseminasi Surat Pemberitahuan SPV PDM-09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi Transisi PAUD ke SD (daring )

02.

Advokasi dan Pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi Paud ke SD kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (luring 22 Kab/kota)



03.

Penguatan Peran Bunda PAUD dalam rangka pemenuhan hak esensial anak bersama BPMP, BGP dan Seameo Ceccep



## 04.

Koordinasi dan sosialisasi kebijakan MPLS Transisi PAUD ke SD kepada Pokja Bunda PAUD Webinar penguatan MPLS SD kelas awal (daring)



## 05.

Gebyar Transisi PAUD SD

1. Supervisi pelaksanaan RTL Pokja Bunda PAUD
2. Koordinasi Kemitraan dengan Mitra Pembangunan
3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Mitra Pembangunan tentang perubahan pembelajaran



## 06.

Sosialisasi dan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivasi Forum Komunikasi Transisi PAUD ke SD



## 07.

Tindak lanjut Bimtek UPT BPMP NTT ke Satuan Pendidikan dan pendampingan pengawas dalam pembelajaran Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di 22 Kab/Kota

## 08.

Monitoring Perubahan Pembelajaran Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan pada Satuan Pendidikan PAUD dan SD Kelas Awal di 6 Kab/Kota

## 05.

### Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja

1. Advokasi oleh Pokja Bunda PAUD di 22 Kab/Kota
2. Keterlibatan Mitra Pembangunan dalam advokasi, sosialisasi dan bimtek ke satuan pendidikan
3. Keaktifan Forum komunikasi Transisi PAUD ke SD di 22 Kab/Kota
4. Pengimbasan oleh guru alumni Bimtek dan guru alumni magang di 22 Kab/Kota
5. Advokasi dan sosialisasi BPMP bersama Dinas Pendidikan dan Kemenag 22 Kab/Kota
6. Dukungan Pemda melalui Peraturan Bupati untuk mensukseskan Transisi PAUD ke SD (Kab. Belu, TTU, Sumba Timur dan Ende)

**06.**

### **Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tahun 2024**

1. Adanya miskonsepsi masyarakat yang bahwa ukuran kemampuan siswa terbatas pada kemampuan calistung saja
2. Pengawas Sekolah masih ada yang belum paham tentang penerapan perubahan pembelajaran pada Transisi PAUD ke SD
3. Pergantian Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang sering terjadi menyebabkan sosialisasi dan advokasi tentang Transisi PAUD ke SD kurang maksimal
4. Tidak semua Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD melakukan advokasi secara maksimal sehingga masih terdapat Sekolah Negeri yang melakukan tes calistung dan melakukan MPLS hanya 3 hari tanpa asesmen awal

**07.**

### **Analisis langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam perealisasiian target kinerja tahun 2024**

1. Melakukan pemantauan dan sharing progress ketuntasan melalui Dasboard Transisi PAUD ke SD
2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas Pendidikan melalui PIC transisi PAUD ke SD di Dinas Pendidikan 22 Kab/Kota
3. Melakukan advokasi kepada pengawas dan Pokja Bunda PAUD

**08.**

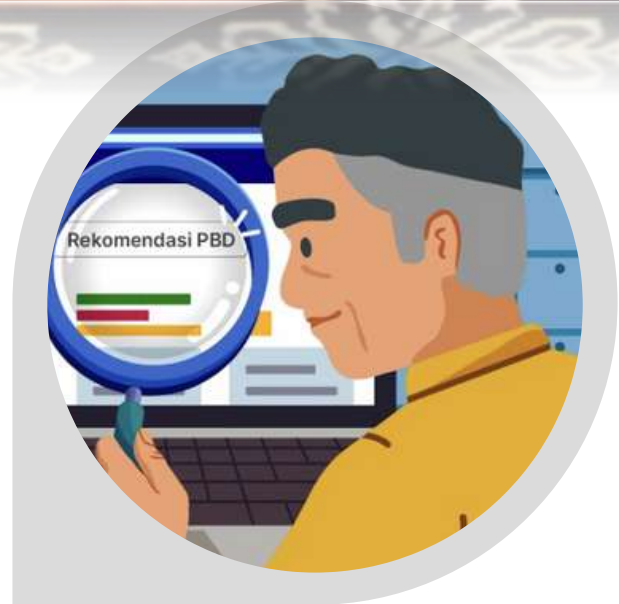
### **Analisis terkait Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024**

1. Berkoordinasi dengan Mitra Pendidikan secara berkala
2. Melakukan advokasi kepada pengawas dan Pokja Bunda PAUD
3. Berkoordinasi dengan guru alumni Bimtek dan guru alumni magang untuk melakukan pengimbasan ke Kombel dan Satuan Pendidikan di daerahnya.
4. Berkoordinasi intens dengan Forum komunikasi Transisi PAUD ke SD dalam memasifkan Transisi PAUD ke SD
5. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan PSP angk. 1,2 dan 3 jenjang PAUD dan SD untuk menerapkan perubahan pembelajaran Transisi PAUD ke SD.

Dashboard Transisi PAUD SD yang dikelola oleh tim PDM 09 Pusat  
<https://s.id/Dasbor-Bimtek-Guru-PPDB-TransisiPAUDSD>.



# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.2



## PERSENTASE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MENINGKAT MUTU RAPOR PENDIDIKANNYA (DIKDAS DAN DIKMEN)

### 01. Definisi Operasional

Definisi Operasional IKK 1.2 adalah Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya. Dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Sumber data Rapor Pendidikan berasal dari BSKAP Kemendikbudristek. Rapor Pendidikan merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan yang mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Data Rapor Pendidikan berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan (seperti PMM, ARKAS, dan SIMPKB), Badan Akreditasi Nasional (BAN) serta Tracer Study (khusus data jenjang SMK).

Sebagai salah satu sumber data utama, Asesmen Nasional (AN) terdiri dari tiga alat ukur penilaian: Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

## 02. Metode Perhitungan

Metode Perhitungan IKK 1.2 untuk tahun 2024 sampai dengan laporan kinerja selesai disusun belum di rilisnya rapor pendidikan hasil asesmen nasional tahun 2024 oleh BSKAP Kemendikbudristek.

Oleh karena itu, untuk tahun 2024 metode perhitungan menggunakan perbandingan data dari nilai indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024, dimana nilai indeks capaian Standar Pelayanan Minimal diperoleh dari persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu (20%) ditambah persentase pencapaian penerima layanan dasar dikali bobot penerima layanan (80%).

Berikut tabel Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dan 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

No	Kabupaten / Kota	Indeks SPM		Naik/(Turun)	Capaian SPM
		2023	2024		
1	Kab. Kupang	44.21	53.73	9.52	Belum Tuntas
2	Kab. Timor Tengah Selatan	44.27	51.51	7.24	Belum Tuntas
3	Kab. Timor Tengah Utara	49.62	59.19	9.57	Belum Tuntas
4	Kab. Belu	42.49	52.16	9.67	Belum Tuntas
5	Kab. Alor	43.03	53.98	10.95	Belum Tuntas
6	Kab. Flores Timur	56.75	63.76	7.01	Tuntas Muda
7	Kab. Sikka	53.60	61.09	7.49	Tuntas Muda
8	Kab. Ende	48.18	58.00	9.82	Belum Tuntas
9	Kab. Ngada	62.37	75.43	13.06	Tuntas Pratama
10	Kab. Manggarai	48.66	61.70	13.04	Tuntas Muda
11	Kab. Sumba Timur	48.16	58.86	10.70	Belum Tuntas
12	Kab. Sumba Barat	40.11	55.30	15.19	Belum Tuntas
13	Kab. Lembata	61.51	68.07	6.56	Tuntas Muda
14	Kab. Rote Ndao	51.92	65.42	13.50	Tuntas Muda
15	Kab. Manggarai Barat	50.96	58.36	7.40	Belum Tuntas
16	Kab. Nagekeo	61.85	75.89	14.04	Tuntas Pratama
17	Kab. Sumba Tengah	55.46	71.47	16.01	Tuntas Pratama
18	Kab. Sumba Barat Daya	41.93	47.14	5.21	Belum Tuntas
19	Kab. Manggarai Timur	50.68	60.21	9.53	Tuntas Muda
20	Kab. Sabu Raijua	52.80	59.15	6.35	Belum Tuntas
21	Kab. Malaka	40.66	45.39	4.73	Belum Tuntas
22	Kota Kupang	59.27	74.90	15.63	Tuntas Pratama
23	Provinsi	38.18	58.35	20.17	Belum Tuntas

Sumber : Data BSKAP Kemendikburistek

Kategori capaian Standar Pelayanan Minimal yang mencakup pelayanan dasar, dengan landasan hukum Permendagri Nomor 59 tahun 2021 adalah:

- 100 (Tuntas Paripurna)
- 90-99 (Tuntas Utama)
- 80-89 (Tuntas Madya)
- 70-79 (Tuntas Pratama)
- 60-69 (Tuntas Muda)
- 60 (Belum Tuntas)

Berdasarkan tabel diatas Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur semua meningkat pada tahun 2024 dari 23 Kabupaten/Kota/Provinsi.

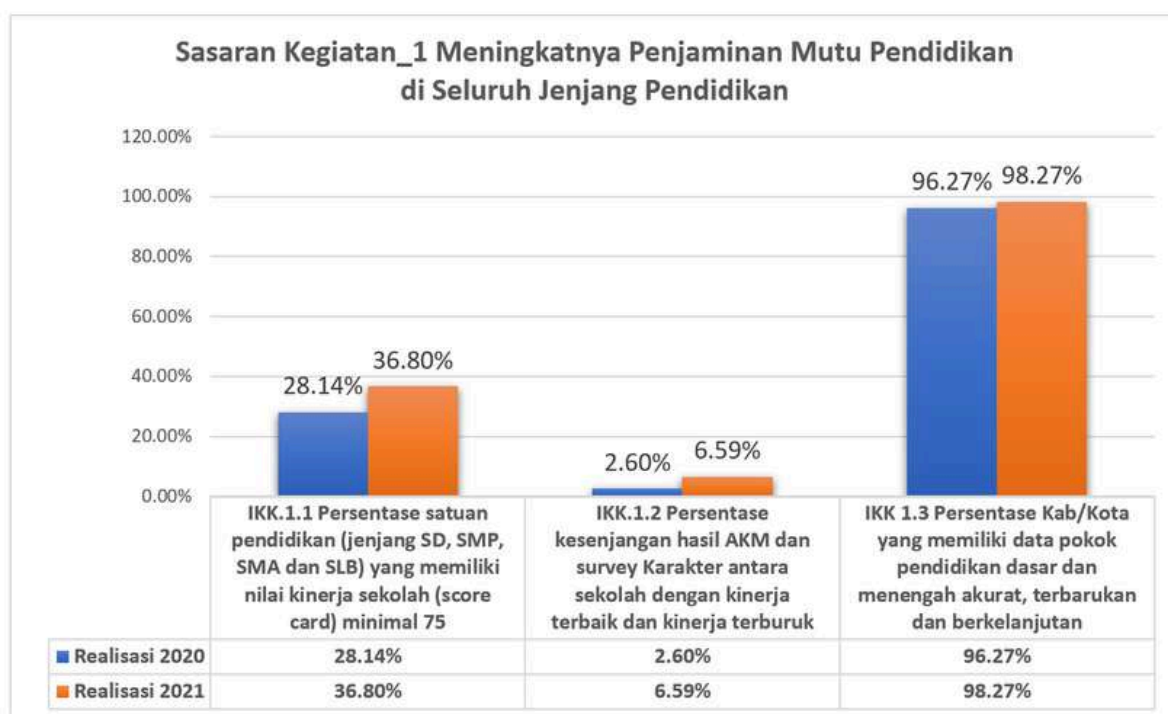
Capaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dari 23 Kabupaten/Kota/Provinsi, 4 Kabupaten/Kota masuk kategori "Tuntas Pratama " yaitu Kabupaten Ngada (75.43), Kabupaten Nagekeo (75.89), Kabupaten Sumba Tengah (71.47) dan Kota Kupang (74.90), 6 Kabupaten masuk kategori "Tuntas Muda" yaitu Kabupaten Flores Timur (63.76), Kabupaten Sikka(61.09), Kabupaten Manggarai (61.70), Kabupaten Lembata (68.07), Kabupaten Rote Ndao (65.42) dan Kabupaten Manggarai Timur (60.21) sedangkan 12 Kabupaten dan 1 Provinsi masih pada kategori "Belum Tuntas"

Hasil capaian persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat mutu rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dirumuskan sebagai berikut:

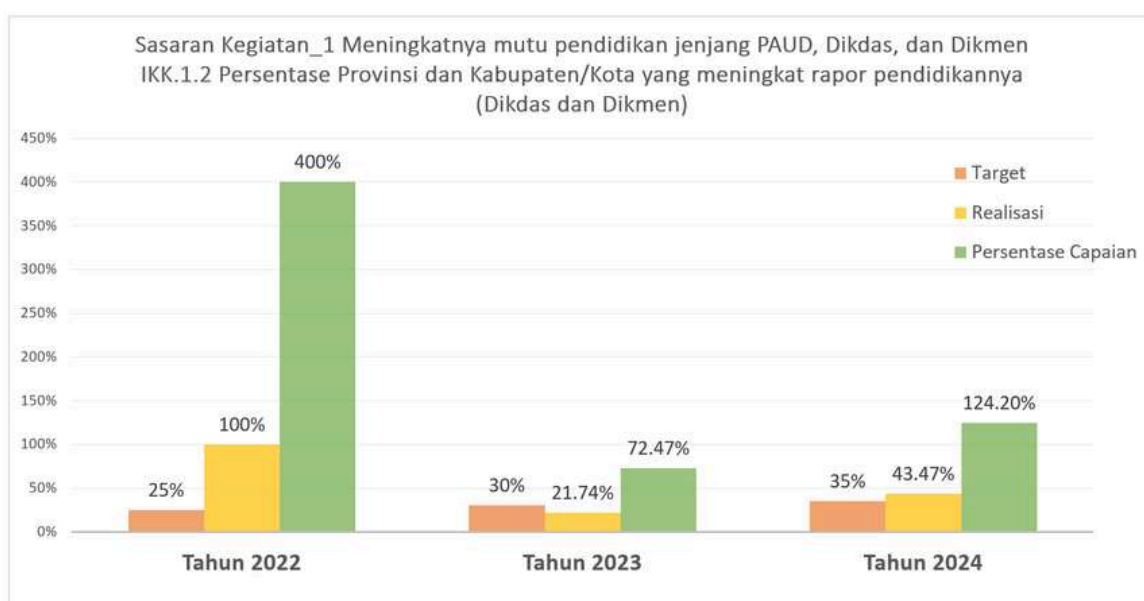
$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &: \frac{\text{Kab\_kota\_naik}}{\text{Jumlah kab\_kota\_prov}} \times 100 \\ &: \frac{10}{23} \times 100 \\ &: 43.47\end{aligned}$$

### 03. Trend Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Untuk capaian kinerja dari tahun 2020 dan 2021 sasaran kegiatan yaitu "Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan". menggunakan hasil akreditasi yang diperoleh dari Dapodik, karena sasaran kegiatan berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan. Berikut dapat di lihat pada grafik di bawah ini:



Untuk capaian kinerja tahun 2022 menggunakan hasil akreditasi yang diperoleh dari Dapodik cut off Semester ganjil (Desember 2022) sehingga presentase capaian 100% dan tahun 2023 dan 2024 menggunakan capaian indeks Standar Pelayanan Minimal. Berikut trend capaian kinerja tahun 2022 -2024 sebagai berikut:



## Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra

Tahun 2023			Tahun 2024			Target Renstra Kemdikbud 2024	% capaian Realisasi terhadap Target Renstra Kemdikbud 2024
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
30.00	21.74	72.47	35.00	43.47	124.20	35.00	124.20

Perhitungan IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat mutu rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) Untuk tahun 2024 dengan target Renstra sebesar 35.00% realisasi yang di peroleh sebesar 43.47%, maka terjadi peningkatan sebesar 124.20%. Melihat target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 35.00% dengan persentase capaian realisasi terhadap target akhir renstra tahun 2024 sebesar 124.20% dapat di artikan bahwa target akhir telah melampaui target yang telah di tetapkan.

Sesuai data diatas, realisasi capaian Tahun 2023 sebesar 21.74%. Jika dibandingkan dengan rencana target capaian yang telah ditetapkan dalam PK sebesar 30.00% maka Presentase Provinsi dan Kab/Kota yang meningkat Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) mencapai 72.47%, dengan demikian tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

## 04. Analisis Program dan Kegiatan terkait, yang mendukung perealisasi target indikator kinerja

Merdeka Belajar Episode 19 Rapor Pendidikan Indonesia, Sejak tahun 2022, Rapor Pendidikan telah digunakan sekolah dan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas layanan.

Pemanfaatan profil dan rapor pendidikan oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik yang didukung dengan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu, profil dan rapor pendidikan akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam memfasilitasi perencanaan penganggaran, pelaksanaan pembelajaran dan penatausahaan di sekolah.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki melakukan sosialisasi, advokasi, pendampingan Rapor Pendidikan PBD untuk satuan pendidikan maupun untuk pemerintah daerah untuk 22 dinas pendidikan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

# “PDM-01”

## Program Sekolah Penggerak

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Terjadinya peningkatan minimal 1 tahap dari kondisi awal di atas level yang diharapkan pada sekolah pelaksana PSP angkatan 1 sebesar 100%.	100%	93%	93%
50% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 dan 2 mengalami peningkatan hasil belajar [dimensi A] pada Rapor Pendidikan	50%	88%	176%
100% satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan skor rapor pendidikan pada indikator dimensi D dan E	100%	100%	100%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Terjadinya pengimbasan oleh satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 terhadap 5.000 satuan pendidikan.	100%	93%	93%
35% Pemda (peningkatan 10% dari tahun 2023) pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP	35%	60%	171%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Pemetaan Sekolah Pelaksanaan PSP dan Sekolah Imbas serta Koordinasi PMO dengan Pemerintah Daerah

**02.**

Kegiatan Workshop Pengimbasan PSP Angkatan 1



**03.**

Kegiatan Pendampingan Forum Pemangku  
Kepentingan PSP Angkatan 2 dan 3



**04.**

Pemantauan dan Percepatan  
Tingkat Transformasi Satuan  
Pendidikan



**06.**

Visitasi Tindak Lanjut  
Pelaksanaan Program Sekolah  
Penggerak oleh Pemda



**05.**

Refleksi Pelaksanaan  
PSP oleh Pemda



## PDM-02

# Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka adalah bagaimana proses pembelajaran di satuan Pendidikan ditransformasikan berdasarkan karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka yakni (1) penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial, (2) pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran, dan (3) rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik, dengan menggunakan strategi-strategi pendukung yang disediakan oleh Kemdikbudristek

## Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan kualitas progres belajar di PMM oleh satuan pendidikan pelaksana IKM dengan indikator baik menjadi 50%	50%	0.07%	0.14%
Peningkatan kualitas pemanfaatan perangkat ajar di PMM oleh satuan pendidikan pelaksana IKM dengan indikator baik menjadi 75%	75%	73.68%	98,24%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
75% satuan pendidikan Pelaksana IKM memiliki komunitas belajar dalam sekolah dengan aktivitas yang didasarkan pada permasalahan peserta didik	75%	87,50% 69,48%	116,7%
Persepsi XX % orang tua terhadap IKM bernilai positif	XX%	88,99%	88.99%
Sekolah IKM mandiri yang mengikuti pendampingan IKM untuk tahun ajaran baru, berdasarkan hasil refleksi tahun ajaran 2023/2024 sebesar 50%	50%	89,20%	178.4%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Sosialisasi Pendaftaran IKM dan Persiapan Pelaksanaan Festival Kurikulum Merdeka



**02.**

Refleksi  
IKM



**03.**

Pelaksanaan  
Festival Kurikulum  
Merdeka



**04.**

Advokasi IKM bagi  
Mitra  
Pembangunan



**05.**

Pendampingan  
IKM bagi satuan  
pendidikan





## Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah

Sumber Daya Sekolah adalah platform yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen untuk pengelolaan dana BOSP agar lebih akuntabel dan transparan. SDS terdiri dari aplikasi ARKAS dan SIPLah

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
90% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLah	90	67%	74%
50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan SIPLah	50%	20%	40%
Rata-rata 90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu/masuk penyaluran Gelombang 1	90%	94%	104%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
100% satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1	100%	60%	60%
50% satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1	50%	51%	102%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Pelatihan Arkas, Markas dan SIPLah



**02.**

Penguatan Fasilitator Daerah Untuk SDS (Sumber Daya Sekolah)



**03.**

Advokasi Pemerintah Daerah Pelaporan Dana BOSP Tahap 1 dan Persiapan Salur Tahap 2 Tahun 2024



**04.**

Bimtek Platform SDS (ARKAS & SIPLah)



**05.**

Workshop Transformasi Digital Platform SDS



**06.**

Webinar Sosialisasi HPP ARKAS dan SIPLah

# “PDM-03B”

## Transformasi Digital untuk Pembelajaran

Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat TIK dan fasilitas akun belajar.id sebagai bagian dari transformasi pembelajaran

**Apa yang ditransformasi?** Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan

**Kenapa perlu ditransformasi?** Mewujudkan pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk mendukung terciptanya Transformasi Pembelajaran

**Kenapa perlu ditransformasi?** Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan perlu menciptakan ekosistem transformasi pembelajaran termasuk pada bagian teknologi

**Kenapa perlu ditransformasi?** Segera, agar tercipta transformasi pembelajaran yang nyata di Satuan Pendidikan

### Objective, target dan Realisasi

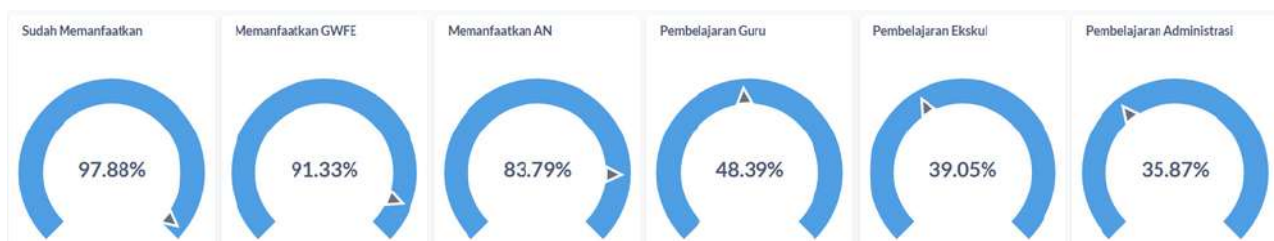
Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan aktivasi akun belajar.id dari 72,96% menjadi 100% di luar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan	100%	63.20%	63.20%
Meningkatkan jumlah Satuan Pendidikan yang memanfaatkan GWE dengan akun belajar.id dari 83,53% menjadi 100% Satuan Pendidikan	100%	99.21%	99.21%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat	100%	99.89%	99.89%
Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan DAK TIK	100%	99.56%	99.56%
Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion dari 23 Pemda	23	15	65%

## DASHBOARD AKTIVASI BELAJAR ID



## DASHBOARD PEMANFAATAN CHROMEBOOK



## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

01.

Advokasi Pemda Untuk Transformasi Digital Dalam Pembelajaran



02.

Penguatan Komunitas Belajar.id dan Rakor PemanTik



03.

Supervisi Program Transformasi Digital dengan Pemerintah Daerah



04.

Microlearning Tahap 1 s.d. 3 bersama SEAMOLEC



# “PDM-04A”

## Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Pendidikan

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Paud Login Paud Unduh	Paud = 90% Paud = 80%	Paud = 97% Paud = 97%	Paud = 107% Paud = 121%
Dasmen Login Dasmen Unduh	Dasmen = 100% Dasmen = 100%	Dasmen = 99% Dasmen = 99%	100%
SLB Login SLB Unduh	SLB = 100% SLB = 100%	SLB = 100% SLB = 100%	100%
SKB Login SKB Unduh	SkB = 100% SKB = 90%	SKB = 100% SKB = 100%	100%
PKBM Login PKBM Unduh	PKBM = 80% PKBM = 70%	PKBM = 98% PKBM = 98%	PKBM = 122% PKBM = 140%



## Rangkuman Adopsi Rapor Satdik

## Pilihan Filter Dashboard

Pembuatan Terakhir  
Jan 26, 2025  
pukul 23:59:59 WIB

Tahun 2024 (1) Nama Provinsi Nama Kab/Kota Pengelompokan Jenjang Sekolah Asat

Tahun	Pengelompokan Jenjang	Populasi NPSN Target	Punya belajar.id	Aktifasi belajar.id	NPSN Login	NPSN Unduh
2024	PAUD	161,205	161,145	159,255	151,953	150,572
2024	SD	145,100	145,098	145,077	144,429	143,668
2024	SMP	41,447	41,447	41,443	41,255	41,132
2024	SMA	14,092	14,092	14,092	14,047	14,017
2024	SMK	13,783	13,783	13,781	13,692	13,651
2024	SLB	1,381	1,381	1,381	1,378	1,374
2024	PKBM	6,286	6,286	6,234	5,568	5,344
2024	SKB	428	428	428	414	411

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

01.

Kegiatan advokasi pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Aktivitas Komunitas Belajar dalam rangka Transformasi Pendidikan

02.

Webinar Unduh Rapor Pendidikan

**BPMP Provinsi NTT**

## WEBINAR RAPOR PENDIDIKAN 2024

... yuk Login, Unduh, Pelajari Akar Masalah ...  
... dan Lakukan Pembinaan untuk Pendidikan Berkualitas ...

**Pembicara**

**Mardiana, S.T.MBA**  
Kepala BPMP NTT

**Dr. Lanny Anggraini, S.Pd., MA**  
PIC PDM 4 Kemendikbudristek

**Moderator**

**M. Nasir, S.Pd**  
Lead PDM 4A BPMP NTT

**Yandri D.I Snao, S.Pd., MT**  
Ketua Tim Kerja 4 BPMP NTT

**Rabu**  
27 Maret 2024

**Jam**  
10:00 - 12:00 Wita

**Zoom Meeting**  
ID : 878 1122 4192  
Passcode : HAUMENI

**Live Streaming Youtube**  
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Konfirmasi Hadir dengan isi link dibawah:  
[bit.ly/konfirmasi-hadir-daring-2024](https://bit.ly/konfirmasi-hadir-daring-2024)

**\*Fasilitas SERTIFIKAT**

BPMP Provinsi NTT | BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur | bpmpntt.kemdikbud.go.id | @bpmpntt

### 03.

Pendampingan Satpen yang belum unduh rapor pendidikan dengan skema kumpul di titik desa/kecamatan



### 04.

Monitoring dan Evaluasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan



### 05.

Refleksi PBD



## “PDM-04B”

## Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Pemda

Rapor Pendidikan adalah gambaran capaian kinerja pendidikan daerah berdasarkan 60% hasil asesmen nasional peserta didik yang ditunjukkan dengan capaian kinerja baik, sedang, dan kurang terhadap indikator prioritas SPM pendidikan (literasi, numerasi, karakter, iklim, dan APS), serta 40% lainnya bersumber dari Dapodik, data GTK, data Tracer Study, data SIM pengadaan sekolah, data APBD, data BPS, dan data dari SISPENA (sistem informasi penilaian akreditasi sekolah/madrasah).

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui indikator prioritas SPM Pendidikan	70%	100%	142.85%
Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan	70%	100%	142.85%
Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya	50	100%	200%

23 (semua) Pemda melaksanakan PBD melalui indikator prioritas SPM pendidikan. Jumlah indikator yang direncanakan untuk Dikmen (Pemda Provinsi) sebanyak 78% dari 9 indikator prioritas, sedangkan untuk Dikdas (22 Pemda Kab./Kota) rata-rata sebanyak 85,45% dari 10 indikator prioritas

23 (semua) Pemda melaksanakan PBD melalui indikator prioritas. Rata-rata subindikator yang direncanakan sebesar 31,69% dari 108 subindikator untuk 22 Pemda kab./kota, dan 20,66% dari 213 subindikator untuk Pemda Provinsi

23 (semua) Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya. Sebanyak 56,52% atau 13 Pemda realisasinya lebih besar atau samadengan 50%, dan 12 Pemda melaporknya dengan lengkap

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

01.

Rapat Koordinasi  
Teknis (Rakortek)  
dengan tema:  
Perencanaan dan  
Penganggaran  
Daerah



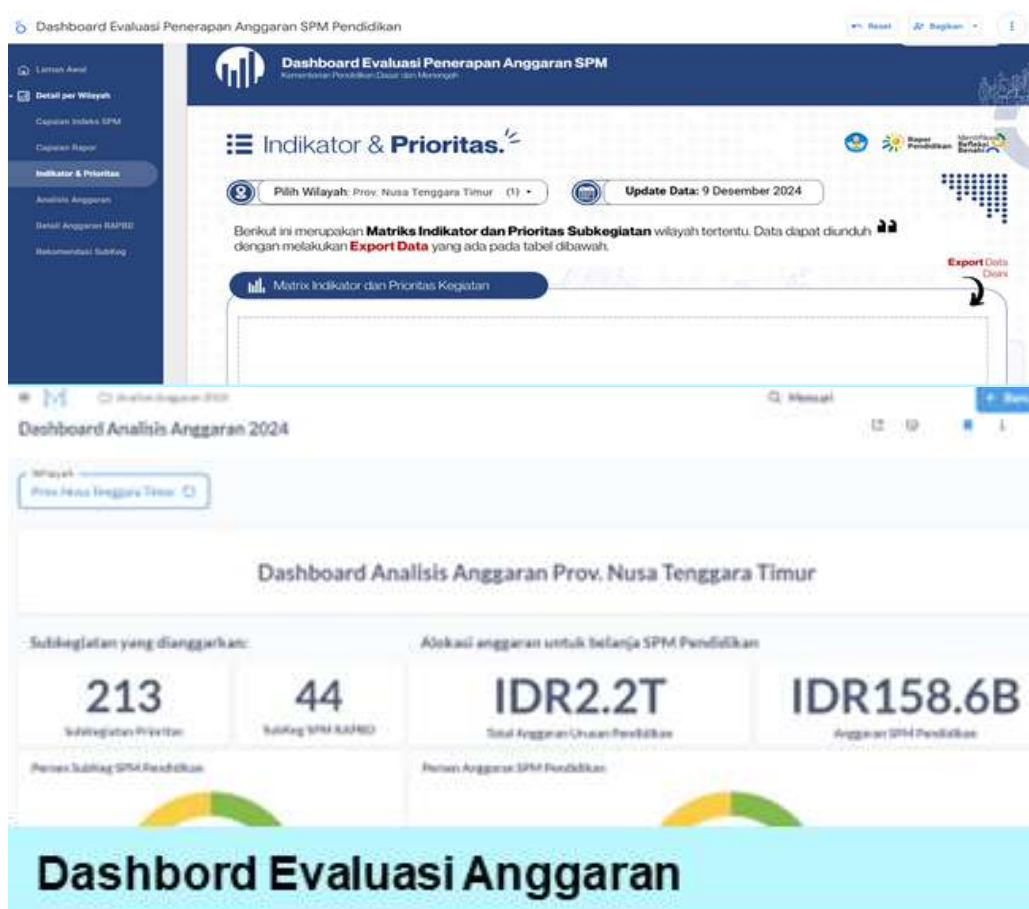
02.

Pendampingan  
Realisasi SPM  
Pendidikan  
Semester I Tahun  
2024



03.

Audiens terkait SPM Pendidikan Daerah di Kantor BAPPERIDA Provinsi NTT





## Kemitraan Daerah

### Guru Penggerak

Guru Penggerak merupakan guru-guru terbaik bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini ke arah yang lebih baik. Kehadiran Guru Penggerak diharapkan menjadi pemimpin - pemimpin pendidikan di masa depan yang mampu menelurkan embrio generasi unggul Indonesia.

Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Guru Penggerak

Guru Penggerak menjadi Syarat untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

### PPKSPS ( Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)

Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis

### PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

PPDB mencakup seluruh proses pelaksanaan seleksi hingga peserta didik baru dinyatakan diterima. PPDB online merupakan proses pelaksanaan PPDB yang dilangsungkan secara digital menggunakan aplikasi atau sistem tertentu. Sedangkan PPDB offline merupakan pelaksanaan PPDB yang dilangsungkan secara tatap muka tanpa didominasi penggunaan teknologi digital.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui 4 jalur yaitu: 1] Afirmasi, 2] Zonasi, 3] Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, 4] Prestasi.

## Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Kebutuhan Kepala Sekolah diangkat dari Guru Penggerak ditahun 2024	20%	38%	190%
Kebutuhan Pengawas Sekolah diangkat dari Guru Penggerak ditahun 2024	50%	10.50%	21%
Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024	90%	100%	111%
Pemda mempunyai satuna tugas PPKSP terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Anak	100%	95%	95%
Satuan pendidikan mempunyai tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKSP)	100%	90.77%	90.77%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

### Guru Penggerak

**01.**

Tindak Lanjut  
Program  
Guru  
Penggerak



**02.**

Advokasi Kepada Pemerintah daerah terkait regulasi pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam masa transisi Pilkada (SEB 3 Menteri; MenpanRB, BKN dan Kemendikbudristek)

**03.**

Bimbingan Teknis terhadap Operator Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Penggerak



## PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

01.

Pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)



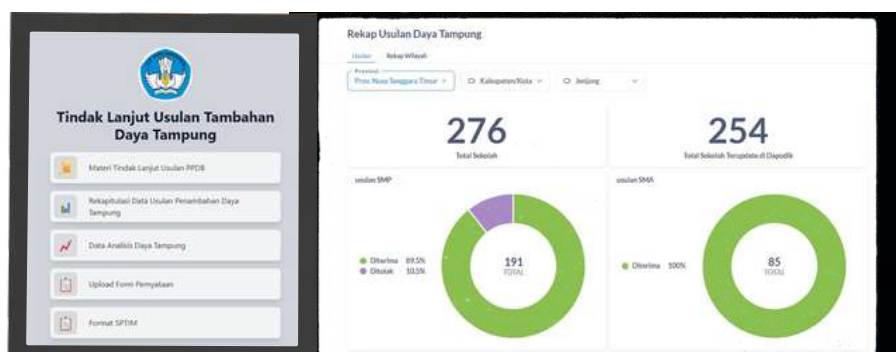
02.

Diskusi terpumpun pendampingan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025



03.

Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB



## PPKSPS ( Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)

**01.**

Sosialisasi Percepatan Pembentukan Satgas PPKSP  
oleh pemda dan TPPK di Satuan Pendidikan



**02.**

Bimbingan Teknis Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan  
terhadap Satgas Daerah



## PDM-06

## Asessmen Nasional

- Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- AN dilaksanakan disemua sekolah, AN dilaksanakan setiap tahun dan di laporkan melalui rapor Pendidikan kesetiap sekolah/madrasah dan pemdasetiap tahunnya
- AN diikuti sebagian (sampel murid yang dipilih secara acak kelas 5,8, dan 11 di setiap sekolah/madrasah

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%	50%	SD = 99,13% SMP = 99.64% SMA = 99.81% SMK = 99.81%	198%
Meningkatkan Pemahaman Stakeholder Daerah terhadap urgensi Kebijakan Ujian Kesetaraan [UK] sebesar 30%.	30%	75%	250%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN Tahun 2024 sebesar 50%.	50%	33,33%	66,66%
Menurunkan Partisipasi satuan yang belum mengikuti Sulingjar Tahun 2024 sebesar 50%	50%	51,04%	102,08%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Workshop Uji Kesenjangan



**02.**

Pemantauan  
Pelaksanaan Uji  
Kesetaraan



**03.**

Workshop  
Asesmen  
Nasional dan  
Pendampingan  
Help Desk



**04.**

Pendampingan dan  
pemantauan  
persiapan AN dan  
sulingjar



**05.**

Pemantauan  
Pelaksanaan AN  
Jenjang SD



## “PDM-07”

## Publikasi dan Komunikasi

- Tim Publikasi dan Komunikasi bertugas mempublikasikan dan mengadvokasikan program-program prioritas. Informasi ini disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri, salah satunya melalui media sosial resmi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- PDM-07 adalah PDM yang tidak mempunyai objective atau target

### Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

#### 01.

Survey Elektibilitas dan kebermanfaatan Media Sosial dan Website Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen



#### 02.

Media Gathering dalam Rangka Kampanye Program Prioritas



03.

Kumpul  
Komunitas NTT



## Media Sosial BPMP Provinsi NTT

01.

Website Resmi BPMP Provinsi NTT  
<https://bpmptntt.kemdikbud.go.id/>



02.

Instagram <https://www.instagram.com/bpmpntt/>



## PDM-08

## Regulasi dan Tata Kelola

- PDM-08 Regulasi dan Tata Kelola berfokus pada Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- Apa itu Ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun adalah Wajib Belajar (Wajar 12 Tahun) ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan. Sasaran Wajib Belajar 12 Tahun ini mencakup seluruh warga Negara Indonesia Khususnya yang berusia 6-21 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
65% Kab/Kota dengan AKS PAUD >75%	65%	Menunggu hasil SUSENAS Tahun 2025	
80% Kab/Kota dengan APS 7-12 tahun >99%	80%		
70% Kab/Kota dengan APS 13-15 tahun >95%	70%		
30% Prov dengan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat >95%	30%		

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

01.

Advokasi  
Pemda Terkait  
Capaian  
Renstra 2023



02.

Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data DO/LTM  
Pada Dashboard ATS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI  
NUSATENGGA TIMUR

Alamat: Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57a Kupang, Nusa Tenggara Timur Laman  
[www.bpmppntt.kemdikbud.go.id](http://www.bpmppntt.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1403/C7.20/DM.00.02/2024

21 Oktober 2024

Lampiran : -

Hal : Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data DO/LTM pada Dashboard ATS (Anak Tidak Sekolah)

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT
2. Kepala Dinas Pendidikan/PPO/PKPO Kabupaten/Kota se-NTT

Dengan hormat, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pusdatin kemdikbudristek telah mengeluarkan surat Pemberitahuan Nomor. 3465/J1/DS.00.01/2021 tentang Verval Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Sejak Tanggal 09 Juli 2021. untuk mendukung dan mempercepat proses Verval Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Maka BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait Verifikasi dan Validasi Data DO/LTM Pada Dashboard ATS oleh Satuan Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk menugaskan seluruh operator satuan pendidikan untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024

pukul : 08.00 – 11.00 WITA

tempat : Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89471083755?pwd=SWdqOW43Q2Yyb2EyQXBjZ0dHQUZ5QT09M>

Meeting ID : 89471083755

Passcode : HAUMENI

Saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Oleh karena itu, kami harapkan Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Revina Riandini pada Nomor 082242181649

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Herdiana, S.T., M.B.A

NIP 197612062008101001

Tembusan Yth:  
PDM 08 Kemdikbudristek, di Ikararata

### Data ATS di Nusa Tenggara Timur (Per 05 Desember 2024)

No	Kabupaten / Kota	BPB	DO	LTM	Total
1	Kab. Kupang	9392	1426	1547	12365
2	Kab. Timor Tengah Selatan	17784	2621	4373	24778
3	Kab. Timor Tengah Utara	3673	1642	1695	7010
4	Kab. Belu	6294	1103	1016	8413
5	Kab. Alor	4313	1555	976	6844
6	Kab. Flores Timur	3728	1532	1372	6632
7	Kab. Sikka	3207	2390	2035	7632
8	Kab. Ende	3989	1316	883	6188
9	Kab. Ngada	1234	927	691	2852
10	Kab. Manggarai	2651	2218	1598	6467
11	Kab. Sumba Timur	3612	1343	1425	6380
12	Kab. Sumba Barat	2971	1028	563	4562
13	Kab. Lembata	2066	875	684	3625
14	Kab. Rote Ndao	2195	455	416	3066
15	Kab. Manggarai Barat	1859	1519	1334	4712
16	Kab. Nagekeo	1527	791	300	2618
17	Kab. Sumba Tengah	1750	495	293	2538
18	Kab. Sumba Barat Daya	12077	2156	899	15132
19	Kab. Manggarai Timur	3482	1875	1390	6747
20	Kab. Sabu Raijua	880	347	336	1563
21	Kab. Malaka	7707	830	900	9437
22	Kota Kupang	6837	726	490	8053
<b>Total</b>					<b>157614</b>

Ket    BPB : Belum Pernah Sekolah  
          DO : Drop Out (dikeluarkan)  
          LTM : Lulus Tidak Melanjutkan

# “PDM-10”

## Pemulihan Pembelajaran

- Pemulihan Pembelajaran merupakan program yang dicanangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada kompetensi dasar literasi dan numerasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah
- Program Kampus Mengajar adalah salah satu bentuk Peningkatan Literasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang cepat berubah

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kesetaraan dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program Pemulihan Pembelajaran (penguatan Literasi);	100%	100%	100%
100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan Kesetaraan dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program Pemulihan Pembelajaran (penguatan Numerasi)	100%	100%	100%
50% Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/ kota melakukan aksi nyata program benahi Literasi dan/ atau Numerasi	50%	50%	100%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

### 01.

Pelepasan dan Pendampingan peserta Program Intervensi Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui program kampus mengajar Angkatan 7



### 02.

Supervisi Program Kampus Mengajar angkatan 7



### 03.

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengimbasan Peningkatan Literasi dan Numerasi



**04.**

Peningkatan  
Kapasitas Fasilitator  
Daerah Penguatan  
Literasi dan Numerasi



**05.**

Pelepasan dan  
Pendampingan peserta  
Program Intervensi  
Pemulihan dan  
Transformasi  
Pembelajaran melalui  
program kampus  
mengajar Angkatan 8



**06.**

Zoom Sosialisasi  
Penilaian Gerak Mulia  
(Video Aksi Nyata) oleh  
TIM Penilai UPT BPMP NTT



**07.**

Penguatan Komunitas  
Belajar Antar Satuan  
Pendidikan sebagai  
Strategi Penguatan  
Literasi dan Numerasi  
jenjang SD di Kota  
Kupang



## PDM-11

## Gerakan Sekolah Sehat

Gerakan Sekolah Sehat adalah segala upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus oleh semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, para mitra, satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya penerapan sekolah sehat dengan berfokus pada sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
80% Satuan Pendidikan di Indonesia Mengetahui Gerakan Sekolah Sehat	80%	80%	100%
90% Satuan Pendidikan Mengimplementasikan secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	90%	74%	98.66%
Satuan Pendidikan Binaan mengimplementasi kan ehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	95%	74%	77.89%

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB terpetakan status kebugarannya	100%	100%	100%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Koordinasi UPT dengan Dinas Pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Kampanye Sekolah Sehat dari UPT ke Pengawas dan TP UKS Provinsi dan Kabuapten/Kota

**02.**

Semarak Gerakan Sekolah Sehat



**03.**

Pendampingan Pelaksanaan Tes Kebugaran Siswa Indonesia



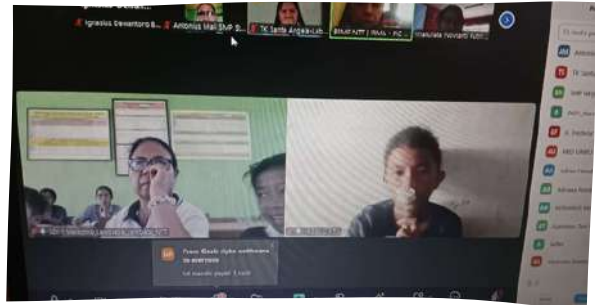
**04.**

Pendampingan/  
supervise/visitasi  
mplementasi  
GSS ke Satuan  
Binaan



**05.**

Zoom Tndak  
Lanjut Progress  
Pengisian  
Instrumen  
Asesmen Midline  
Sekolah Non  
Binaan



**06.**

Advokasi Daring  
Penulisan Praktik  
Baik Implementasi  
GSS – Pembiasaan  
5 Sehat bagi  
Satuan Binaan



**07.**

Hybrid  
GelarWicara



**08.**

Refleksi dan  
Pengumpulan Cerita  
Praktik Baik  
Implementasi GSS



## PDM-12

## PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif	1.301/ 100%	748	57%
Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar)	4.743	6.881	145%
Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjut)	474	0	0

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	238	0	0
Pemerintah daerah memiliki ULD yang aktif	10 Kab 1 Provinsi	22 Kab 1 Provinsi	100%

## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

**01.**

Spendampingan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.



**02.**

Sosialisasi Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusi



**03.**

Advokasi Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dan pendampingan pendidikan Inklusif



# “PDM-14”

## Analisis Data Pendidikan

Proses mengolah data yang berkaitan dengan pendidikan untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan melihat Data Pokok Pendidikan Satuan Pendidikan yang memenuhi 3 indikator utama yaitu kelengkapan data, Validitas dan Muktahir dalam meningkatkan indeks kualitas data pada semua satuan pendidikan

### Objective, target dan Realisasi

Objective	Target	Realisasi	% Capaian
100% Pemda memiliki Peningkatan Indeks Kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	100%	82.36%	82.36%

### Grafik Tabel Dashboard



## Kegiatan yang mendukung ketercapaian target

01.

Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Data Dapodik



02.

Uji Petik Anomali Data



03.

Rapat Koordinasi Indeks Kualitas Dapodik



## 05. **Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

- Adanya kolaborasi pengawas dan kepala satuan pendidikan
- Sekolah masih terbawa kebiasaan lama yaitu membuat perencanaan di tahun berjalan
- Kolaborasi bersama mitra transformasi digital di Daerah (Kapten Beajar.id, Duta Teknologi, PemanTIK dari unsur Dinas Pendidikan)
- Adanya fasilitator daerah yang terbentuk dari unsur Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berperan aktif di daerah
- Dalam masa transisi pilkada sehingga daerah enggan untuk mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ada muatan politik
- penandatanganan Komitmen Bersama untuk pelaksanaan PPDB yang berprinsip Obyektif, Transparan dan Akuntabel telah terbentuk (Ombudsman, Kejati NTT, Kejari Kota Kupang dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTT)
- Satuan pendidikan tidak membentuk TPPK karena guru yang menjadi anggota tidak mendapatkan konversi tugasnya dengan jam pembelajaran yang diwajibkan
- Operator sekolah yang belum mengetahui terkait Verval Data ATS pada dashboard ATS
- Satuan Binaan Tahun 2024 merespon dengan antusias GSS
- Untuk pelatihan pendidikan jenjang pendidikan inklusif tingkat lanjutan sementara sedang berlangsung dan tingkat mahir belum dilaksanakan
- Dinas Pendidikan Kabupaten merespon dan mendukung dengan baik akan pentingnya Dapodik

## 06.

### **Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tahun 2024**

- Adanya pergantian kepala sekolah yang tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya kolaborasi PMO Dinas dan UPT
- Masih banyak miskonsepsi terhadap pendaftaran Kurikulum Merdeka, banyak yang tidak mengetahui bahwa harus mendaftar untuk menjadi satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka
- Masih banyak satuan Pendidikan jenjang PAUD yang tidak memiliki perangkat laptop
- Penyaluran informasi tentang dana BOSP yang belum lancar
- Rendahnya kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan
- Masih adanya satuan pendidikan yang aktif secara data namun secara fakta dilapangan sekolah tersebut sudah tidak aktif lagi, dinas belum melakukan penghapusan NPSN yang mengakibatkan sekolah tersebut masih di anggap aktif dan diharuskan melakukan akses ke rapor pendidikan
- Kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dalam menindaklanjuti Regulasi SEB tiga menteri
- Pemda Belum aware terkait pentingnya pembentukan Juknis turunan PPDB sebagai Pedoman Pelaksanaan PPDB
- Sering terjadi mutasi di daerah yang menyebabkan advokasi kebijakan tidak berjalan maksimal
- Keterbatasan fasilitas internet dan computer/server dan ketidakstabilan pasokan listrik
- Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait Verval Data ATS pada dashboard ATS (Anak Tidak Sekolah) sehingga mempengaruhi jumlah anak yang terindikasi putus sekolah pada dashboard ATS
- Lokasi Satuan Binaan yang berjauhan satu dengan lainnya sehingga menyulitkan BPMP NTT dan Dinas Pendidikan dalam melakukan visitasi ke satuan binaan dan non binaan
- Masih banyak guru yang belum mengikuti pelatihan dikarenakan kondisi geografis yang susah sinyal (daring)
- Sering terjadinya pergantian operator sehingga kesulitan bagi operator baru dalam memahami pengisian data Pokok Pendidikan

## 07.

### **Analisis langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam perealisasi target kinerja tahun 2024**

- Memaksimalkan pengawas sekolah untuk pendamping PSP
- Melakukan sosialisasi pendaftaran IKM tidak hanya secara luring tetapi juga secara daring, dan juga diselipkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
- Mengadakan webinar-webinar secara mandiri tentang dana BOSP dan SIPLah
- Melakukan aktivasi dengan memanfaatkan tenaga prakerin SMK yang magang di kantor BPMP NTT
- Melakukan update secara manual dan melaporkan ke tim PDM 4A pusat melalui grup WA agar sekolah yang sudah tidak aktif dapat di hapus dari sasaran akses rapor pendidikan
- Memfasilitasi pengajuan kendala yang dialami oleh operator ke helpdesk pusat agar tertangani dengan cepat, seperti pengusulan formasi pengawas sekolah ke MENPANRB
- Menghubungi satuan Pendidikan yang belum membentuk TPPK melalui Telp dan WA
- Dinas mendata satuan pendidikan yang terkendala sarana internet, computer dan Listrik untuk di cari solusi
- Melakukan Sosialisasi Terkait Verval data ATS
- Membuka layanan konsultasi kepada satuan binaan maupun non binaan
- Membentuk Tim Operator Kecamatan di kabupaten/kota untuk mempermudah dinas pendidikan dalam mengawal keakuratan data pokok pendidikan di satuan pendidikan

## 08. Analisis terkait Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024

- Meningkatkan kompetensi pengawas PSP dalam membaca rapor pendidikan
- Kegiatan advokasi di daerah dikemas menjadi kegiatan pendampingan dengan melibatkan Fasilitator Daerah
- Membuat grup WA dengan tim manajemen BOSP dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk penyaluran informasi yang cepat
- Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi pendidik di daerah (Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Melalui PemanTIK Bersama Duta Teknologi dan Komunitas Belajar.id)
- Pembentukan fasilitator daerah sangat memudahkan BPMP dalam pencapaian angka cepat untuk akses rapor pendidikan ditengah keterbatasan kegiatan yang tersedia
- Terus melakukan koordinasi dengan Pemda (Dinas Pendidikan) agar dapat menerapkan regulasi terkait pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak
- Pendampingan Pemda secara intensif untuk Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan PPDB TA. 2024/2025
- Masing-masing Kordinator kabupaten proaktif dalam memantau pembentukan TPPK sampai dengan penginputan di Dashboard
- Melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan AN untuk mengatasi kendala sedini mungkin
- Berkoordinasi dengan Dinas Untuk Sosialisasi verval data ATS kepada semua Operator Sekolah
- Advokasi dan sosialisasi melalui media sosial, IG BPMP, FB BPMP dan FB Grup Gerakan Sekolah Sehat, media cetak dan elektronik
- Advokasi dan pendampingan pemulihan pembelajaran dilakukan secara terus menerus baik lewat daring maupun luring
- BPMP Prov. NTT dan Operator Dinas Pendidikan dengan untuk terus mengupdate data Pokok Pendidikan sesuai dashboard Pada Indeks Kualitas Data untuk dipantau perkembangan Dapodik setiap Satuan Pendidikan



## Sasaran Kegiatan 2

### Meningkatnya Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur

Tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perbaikan secara signifikan. Perbaikan tatakelola tersebut melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada bulan November 2023

Selain itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

Bukti adanya perbaikan tatakelola di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terlihat dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang semakin meningkat kualitasnya. Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan internal oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan capaian predikat "A" dengan interpretasi "Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel". Demikian pula dengan Nilai Kinerja Anggaran selalu meningkat tahunnya

Berikut perbandingan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai berikut:



# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1



## PREDIKAT SAKIP BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NUSA TENGGARA TIMUR

### 01. Definisi Operasional

Definisi operasional IKK 2.1 ini adalah Predikat yang menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## 02. Metode Perhitungan

Metode perhitungan IKK 2.1 adalah predikat yang diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek, yaitu Itjen Kemendikbudristek. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah Kualitatif (Predikat). Sedangkan tipe perhitungan yang digunakan non kumulatif yang diukur secara tahunan.

$$\text{Nilai Sakip} = [ \text{Perencanaan Kinerja} ] + [ \text{Pengukuran Kinerja} ] \\ + [ \text{Pelaporan Kinerja} ] + [ \text{Evaluasi Kinerja} ]$$

Kategori Penilaian SAKIP

KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan
BB	> 70 – 80	Sangat Baik
B	> 60 – 70	Baik
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 – 50	Kurang
D	> 0 – 30	Sangat Kurang

### 03. Trend Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan penilaian AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Implementasi tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dengan implementasi tersebut unit kerja diharapkan menghasilkan hasil kinerja yang maksimal. Berikut Trend capaian SAKIP dari tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:



Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 – 2024, capaian secara angka ada peningkatan nilai capaian setiap tahunnya

## Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra

Tahun 2023			Tahun 2024			Target Renstra Kemdikbud 2024	Target Akhir Renstra Kemdikbud 2024
Target	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Target	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP		
A	80.55	A	A	82.10	A	A	A

Pada tahun 2023 dan 2024 implementasi sistem akuntabilitas kinerja di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Predikat "A" dengan interpretasi "Memuaskan", "Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator"

Hasil Evaluasi SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 predikat "A" dengan nilai 82.10 dengan interpretasi. Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2024 "Tercapai" dan mengalami kenaikan 1.55 poin.

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:



Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19.25
Predikat		A	82.1

## 04. Analisis Program dan Kegiatan terkait, yang mendukung perealisasi target indikator kinerja

### PERENCANAAN KINERJA

- Reviu Renstra melalui SPASIKITA Tahun 2024
- Penyusunan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPMP dengan Direktur Jenderal PAUD DIKDAS dan DIKMEN
- Sosialisasi Perjanjian Kinerja
- Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan
- Penyampaian dan publikasi dokumen SAKIP (Renstra, PK, dan Laporan Kinerja) melalui Laman BPMP Provinsi NTT



- Membentuk TIM SAKIP
- Membentuk TIM Reformasi Birokrasi
- Rapat Rutin antara PMO dan PIC PDM setiap minggu ke satu dan ke ketiga setiap bulan untuk membahas kegiatan bulan berikutnya
- Pendampingan dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
- Uji Publik Dokumen Layanan Publik ZI-WBK BPMP Provinsi NTT

- Senin Belajar yang telah diganti nama menjadi "SEIRAMA" yang merupakan akronim dari "Senin Informasi, Refleksi Hasil Kerja Bersama" dilakukan secara Rutin setiap hari Senin diawali dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan SEIRAMA.



- Sharing session Mentoring dan Coaching SDM UPT BPMP Provinsi NTT tahun 2024



- Penyusunan Prosedur Operasional Standar BPMP Provinsi NTT



- In House Training (IHT) Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur



- Studi Tiru Praktik Baik di BBPMP Sulawesi Selatan, BBGP Sulawesi Selatan, BBPPMPV KPTK, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BPMP DKI Jakarta, BBPPMPV Seni dan Budaya, BPMP DI Yogyakarta, BGP DI Yogyakarta, BBPMP Jawa Tengah, BBGP Jawa Tengah, BBPPMPV BOE Malang, BBPMP Jawa Timur dan BBGP Jawa Timur
- Pelatihan Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (KP3L) bagi PPNPN di Lingkungan BPMP Prov. NTT



## PENGUKURAN KINERJA

- Evaluasi Capaian Kinerja Awal Tahun
- Review Post Pengumpulan Data Kinerja
- Membuat Google sheet terkait Pengumpulan data Kinerja
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan anggaran secara periodik min pertriwulan
- Pengukuran capaian kinerja Setiap bulan/Triwulan dan semester melalui aplikasi SPASIKITA

## PELAPORAN KINERJA

- Penyusunan Laporan setiap PDM
- Analisis Capaian Kinerja berdasarkan laporan PDM
- Penyusunan Laporan Kinerja tahun sebelumnya
- Publikasi Laporan Kinerja di Laman BPMP Provinsi NTT

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

- Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP BPMP Provinsi NTT Tahun 2023
- Pemenuhan Dokumen AKIP
- Evaluasi Akuntabilitas Internal
- Evaluasi Akuntabilitas oleh Kemendikbudristek

## **05. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

- Komitmen pimpinan terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja
- Komitmen Kepala untuk percepatan ZI-WBK/WBBM;
- Aktivitas penginputan penyusunan laporan tiap triwulan secara konsisten
- Pemberian penghargaan kepada ASN dan PPNN teladan Tahun 2024;
- Pendokumentasian setiap kegiatan dengan lebih baik.
- Peningkatan kapasitas SDM
- SDM yang kompeten.

## **06. Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tahun 2024**

- Pemahaman terkait perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional lembaga; dan
- Pegumpulan Data Kinerja internal yang masih menggunakan Google Sheet
- Pendokumentasian Kegiatan yang masih belum maksimal, sehingga masih menyulitkan dalam pengumpulan bukti kinerja

## **07. Analisis langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam perealisasi target kinerja tahun 2024**

- Melakukan penguatan kapasitas SDM secara internal di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengusulkan beberapa SDM untuk mengikuti pelatihan SAKIP;
- Penguatan Akuntabilitas semua staff untuk memperkuat komitmen bersama;
- Inovasi dalam pengembangan Sistem Pengumpulan Data Internal

## 08. Analisis terkait Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024

- Memperkuat komitmen bersama melalui kegiatan SEIRAMA
- Menyusun SKP masing-masing pegawai berbasis PK Kepala berdasarkan PermenP ANRB nomor 6 Tahun 2022;
- Mempelajari dan mengikuti sosialisasi tentang PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 sehingga diperoleh pemahaman dalam melaksanakan evaluasi AKIP.

# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.2



NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN  
RKA-K/L BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
NUSA TENGGARA TIMUR

## 01. Definisi Operasional

Definisi operasional Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan penggunaan anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang penilaiannya dilakukan oleh Kemenkeu.

Nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Sedangkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diambil dari aplikasi SMART DJA (<https://smart.kemenkeu.go.id/>).

## 02. Metode Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran :  $[50\% \times \text{Nilai IKPA}] + [50\% \times \text{Nilai EKA}]$

### 03. Trend Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

Pencapaian NKA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	IKPA	EKA	NKA
Tahun 2020	97.00	99.00	97.80
Tahun 2021	94.65	96.29	95.64
Tahun 2022	92.77	99.46	96.78
Tahun 2023	99.40	91.65	95.53
Tahun 2024	99.01	100	99.51

Tren NKA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut :



## Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra

Realisasi 2023			Realisasi 2024		
Nilai IKPA	Nilai EKA	Nilai NKA	Nilai IKPA	Nilai EKA	Nilai NKA
99.4	91.65	95.53	99.01	100	99.51

Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 99.51% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 95.53%. Nilai EKA mengalami kenaikan dari 91,65 pada tahun 2023 menjadi 100. Nilai IKPA mengalami penurunan dari 99,40 di tahun 2023 menjadi 99,01 di tahun 2024.

Terdapat dua komponen pada IKPA yang belum mencapai 100% yaitu Penyerapan Anggaran sebesar 95.09% dan Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99.90%. Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah/target akhir renstra adalah sebagai berikut:

Realisasi 2024			Target Akhir Renstra Kemdikbud 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra Kemdikbud 2024
Target	Realisasi	%		
95.55	99.51	104.14	85	117.07

Dari tabel dapat dilihat Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar 99.51 lebih tinggi dari target sebesar 95.55. Persentase capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 104.14%. Untuk persentase capaian realisasi terhadap target akhir tahun renstra 2024 sebesar 117.07%. Hal ini berarti pada tahun 2024 persentase capaian realisasi telah melebihi target akhir Renstra 2024.

#### **04. Analisis Program dan Kegiatan terkait, yang mendukung perealisasi target indikator kinerja**

- Penyampaian Laporan Keuangan BPMP Provinsi NTT tepat waktu
- Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal dan realisasi anggaran yang mengacu pada RPD Halaman III DIPA
- Penyampaian data kontrak dan pengajuan SPM kontraktual sesuai ketentuan yang berlaku
- Memastikan seluruh transaksi sudah sesuai dengan akun yang benar
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan penerimaan sesuai batas yang telah ditentukan ke KPPN
- Menyampaikan laporan capaian kegiatan/output melalui aplikasi SPASIKITA dan aplikasi SAKTI setiap awal bulan.

#### **05. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

- Unsur Pimpinan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensinya.
- Pemetaan SDM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Dukungan dari stakeholder dalam keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran.

#### **06. Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tahun 2024**

- Jadwal kegiatan dan sudah disesuaikan dengan rencana penarikan dana di Halaman III DIPA tapi kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal
- Anggaran Belanja Modal di blokir sampai bulan Maret dan buka blokir di bulan April
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Penyerapan Anggaran dan Pengeloan UP dan TUP yang belum bernilai 100.00.
- Adanya edaran Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 tentang efisiensi belanja perjalanan dinas;

## **07. Analisis langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam perealisasi target kinerja tahun 2024**

- Membuat jadwal sesuai dengan realisasi program
- Penyerapan Anggaran dimaksimalkan
- Pengeloan UP dan TUP sesuai jadwal KPPKN

## **08. Analisis terkait Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024**

- Membuat jadwal kegiatan dan program dari awal tahun dengan komitmen tidak berubah jadwalnya
- Memastikan output yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran
- Melakukan Efisiensi Anggaran



## B. REALISASI PROGRAM / AGENDA PRIORITAS

Program prioritas nasional adalah program, kegiatan, atau proyek yang bertujuan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program ini juga bertujuan untuk mendukung kebijakan Presiden.

Pada pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara timur dalam DIPA tahun 2024 telah dialokasikan untuk menunjang program prioritas yang merupakan kelanjutan dari program prioritas tahun sebelumnya. Kegiatan yang merupakan program prioritas adalah Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas.

Capaian Rincian Keluaran menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

Program prioritas terdiri dari dua komponen, yaitu Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan kode 750 dan Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan kode 850. Realisasi dari kedua komponen tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase masing – masing adalah 100%. Dapat di lihat pada tabel di bawah.

LAPORAN REALISASI KINERJA  
Tahun Anggaran 2024

2024-12  
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
023.03 - Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
24.51 - KOTA KUPANG/NUSA TENGGARA TIMUR  
410646 - BPUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Periode s.d bulan  
Kementerian Negara/Lembaga  
Eselon 1  
Wilayah/Provinsi  
Satuan Kerja

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian		
10	PENDIDIKAN	39.524.039.000.00	38.245.866.482.00	96.77%						
02	PENDIDIKAN DASAR	39.524.039.000.00	38.245.866.482.00	96.77%						
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	17.764.792.000.00	16.609.856.717.00	93.5%						
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmas dan Dikmas	17.764.792.000.00	16.609.856.717.00	93.5%						
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17.764.792.000.00	16.609.856.717.00	93.5%						
750	Satuan Dikdas dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	17.384.952.000.00	16.231.270.707.00	93.36%	7678	Lembaga	7678	100%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Pagu yang muncul pada RO ini adalah pagu yang belum di kenakan efisiensi pemotongan 50% sisa perjalan, sedangkan pagu real pada RO ini adalah
850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	379.840.000.00	378.586.010.00	99.67%	5916	Lembaga	5916	100%	00	Kegiatan sudah selesai dilakukan dan dipertanggungjawabkan keuangannya
WA	Program Dukungan Manajemen	21.759.247.000.00	21.636.009.765.00	99.43%						
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	21.759.247.000.00	21.636.009.765.00	99.43%						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.507.134.000.00	18.385.790.648.00	99.34%						
956	Layanan BMN	10.000.000.00	10.000.000.00	100%	1	Dokumen	1.0000	100%	00	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
962	Layanan Umum	490.900.000.00	475.630.726.00	96.89%	1	Layanan	1.0000	100%	00	Kegiatan sudah selesai dilakukan
994	Layanan Perkantoran	18.066.234.000.00	17.900.159.922.00	99.41%	1	Layanan	1.0000	100%	00	Semua Belanja Pegawai telah dibayarkan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.252.113.000.00	3.250.219.117.00	99.94%						
951	Layanan Sarana Internal	1.463.500.000.00	1.461.773.783.00	99.88%	1	Unit	1.0000	100%	00	Belanja Modal sudah BAST semuanya
971	Layanan Prasarana Internal	1.788.613.000.00	1.788.445.334.00	99.99%	1	Unit	1.0000	100%	00	Belanja Modal sudah BAST semuanya



## C. REALISASI ANGGARAN

### Capaian Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp39.524.039.000.00. Pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp38.245.866.482.00 dengan persentase daya serap sebesar 96,77%.

Pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami empat belas kali revisi, dari pagu awal Rp37.627.983.000.00. Pada revisi DIPA kesebelas mengalami penambahan anggaran menjadi Rp39.524.039.000.00. Namun pada posisi akhir anggaran masih terdapat pagu blokir sebesar Rp1.158.403.000.00, hal ini menindaklanjuti SE Menteri Keuangan RI No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November Hal Langkah – Langkah Penghematan Kementerian/Lembaga TA. 2024.



### Realisasi Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	12.337.731.000	0	12.232.832.617	99,15	12.232.832.617	99,15
2	BELANJA BARANG	23.934.195.000	1.158.403.000	22.762.814.748	95,11	22.762.814.748	95,11
3	BELANJA MODAL	3.252.113.000	0	3.250.219.117	99,94	3.250.219.117	99,94
	<b>TOTAL</b>	<b>39.524.039.000</b>	<b>1.158.403.000</b>	<b>38.245.866.482</b>	<b>96,77</b>	<b>38.245.866.482</b>	<b>96,77</b>

Pagu anggaran tersebut di gunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		%
		%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	5916 Lembaga	379.840.000.00	5916 Lembaga	378.586.010.00	99.67
IKK 1.2	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	7678 Lembaga	17.384.952.000.00	7678 Lembaga	16.231.270.707.00	93.36
SK. 2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur						
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTT	A	21.759.247.000.00	A (82.10)	21.636.009.648.00	99.43
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	95.55		99.51		
Total			39.524.039.000.00		38.245.866.365.00	96.77

Dari daya serap 96.77% terdapat sisa anggaran sebesar Rp119.769.518.00 terdiri dari sisa anggaran uang makan dan sisa kegiatan yang lain

## Capaian Anggaran

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar **2,10%** atau sebesar **Rp830.526.000,00**. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

- Menggunakan SDM BPMP yang potensial untuk menjadi Narasumber
- Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan meeting yang rencana awal menggunakan fullboard di luar kantor menjadi Hybrid atau fullboard di dalam kantor
- Menggabungkan dua atau lebih kegiatan dalam satu kegiatan yang mempunyai sasaran peserta yang sama
- Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring;



## D. KINERJA LAIN-LAIN

### 1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut

#### 1. Penataan Organisasi

Penataan organisasi merupakan proses untuk mengatur struktur organisasi agar lebih efisien dan efektif. Penataan organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki fungsi dan ukuran yang tepat. Untuk memudahkan koordinasi pada 22 kab/kota di Prov. NTT, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penataan organisasi dengan menerapkan sistem pembagian Wali Wilayah.

## SK pembagian wali wilayah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Alamat Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57a Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telepon (0380) 821149 dan 822910, Laman [www.bpmprntt.kemdikbud.go.id](http://www.bpmprntt.kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0017/C7.20/KP.10.00/2024  
TENTANG  
TIM KERJA, LEAD PDM, DAN WALI WILAYAH  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NTT**

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon perubahan organisasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 sekaligus sebagai salah satu upaya mewujudkan dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta manajemen pelaksanaan program kegiatan lembaga yang efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan personel Tim Kerja, Lead PDM 1 sampai dengan PDM 14, dan Wali Wilayah di lingkungan BPMP Provinsi NTT;
- c. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini di pandang cakap dan kompeten melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja, Lead PDM 1 sampai dengan PDM 14, dan Wali Wilayah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT.

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT  
Nomor : 0017/C7.20/KP.10.00/2024  
Tanggal : 04 Januari 2024

**WALI WILAYAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Wilayah 1 : Maria Bernadetha Adventia, S.H., M.Hum

Kabupaten	Nama			
Sumba Barat Daya	Fredrik H. Dami, S.Sos	Roswita Marlies Erawati Uly, S.Pd	Denyson L.I. Ang Djadi, ST, MT	Gertrudis Bili, S.Sos
Nagekeo	Bambang Gustomo, S.Pd	Damianus Iku, S.Pd	Vinsensius Pati Kein, S.Pd	Moses Koly, S.Pd
Manggarai Barat	Welhelmince Thersia Kana, S.E.	Isyana R.M.A. Rupidara, SE.	Samuel Kaseh, S.Kom	
TTU	Maria Bernadetha Adventia, S.H., M.Hum	Petrus Totu, S.Sos	Andro Okresden Loe, S.T.	Yane M. Tanodi, S.Pd

## 2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Penataan tatalaksana dilakukan untuk mencapai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dicanangkan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk penataan tatalaksana BPMP Prov. NTT membuat Prosedur Operasional Tetap (SOP) yang mengacu pada proses bisnis yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dan serta mengubah pola pikir dan budeaya kerja pegawai

Kegiatan penyusunan SOP



### 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Penataan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas manajemen SDM. Upaya yang telah dilakukan oleh BPMP Prov. NTT untuk peningkatan profesionalisme pegawai adalah melakukan SEIRAMA (Senin Informasi, Refleksi Hasil Kerja Bersama). SEIRAMA menjadi wadah bagi Tim BPMP Prov. NTT untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pembelajaran yang didapat dari setiap tugas yang telah dilaksanakan



## 4. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas merupakan program untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Dalam upaya penguatan akuntabilitas di BPMP Prov. NTT maka hal-hal yang telah dilakukan adalah pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART, menyusun laporan kinerja tepat waktu meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan memberikan reward dan punishment

### RAPAT BULANAN PMO, LEAD PDM DAN KONSULTAN



### ZI-WBK BPMP NTT 'Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi'

#### Area Akuntabilitas



BPMP NTT, 16 Desember 2024

## 5. Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi Informasi

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai proses administratif dan layanan Pendidikan untuk mempermudah akses informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan efisiensi birokrasi. Dalam proses administrasi keuangan BPMP Prov. NTT mengembangkan aplikasi SASANDU (Sistem Aplikasi layanan terpadu). Untuk layanan informasi data Pendidikan, BPMP Prov. NTT juga telah membuat Dashboar data Pendidikan



## 6. Peningkatan Layanan kepada Masyarakat

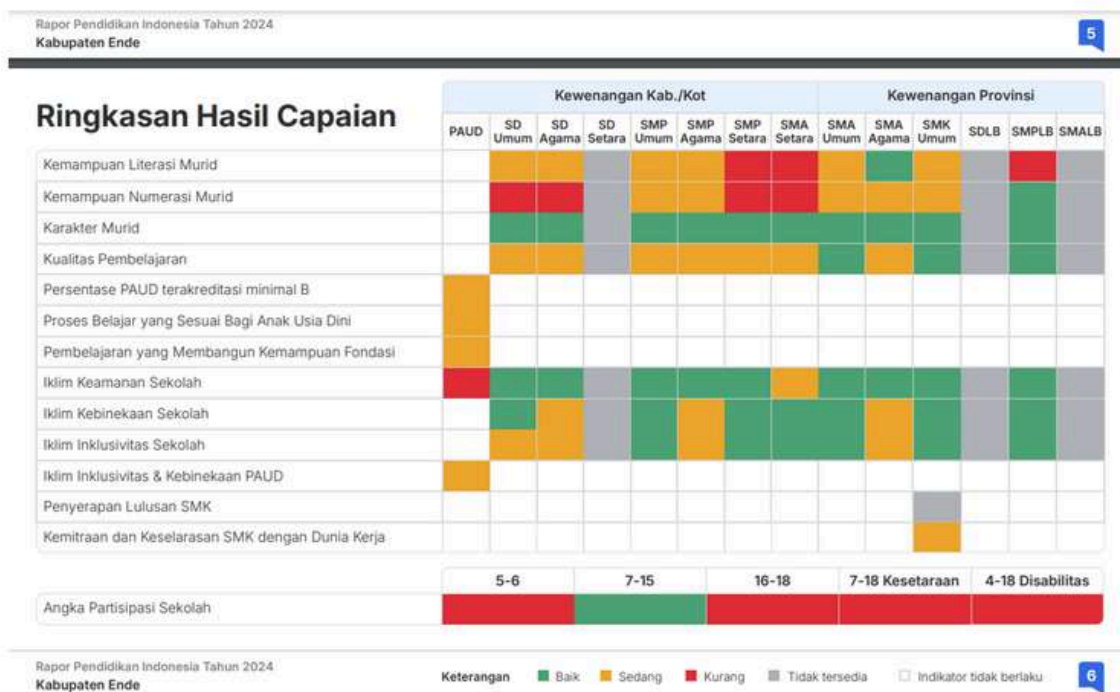
Dalam upaya peningkatan layanan kepada Masyarakat, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat, termasuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi Pendidikan dengan meningkatkan layanan ULT (Unit Layanan Terpadu)



## 2. Informasi Capaian Kinerja lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur melanjutkan kegiatan inovasi yaitu adalah Program Reading Camp.

Langkah awal sudah dilakukan di tahun 2023 selanjutnya BPMP Provinsi NTT dalam mengawal pengimplementasian Kurikulum Merdeka di Kabupaten Ende melanjutkan program Reading Camp tujuan membantu sekolah terutama guru dalam pengelolaan kelas yang mana harus diawali dengan Asesmen Diagnostik untuk memetakan kemampuan literasi dasar siswa, agar dapat menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi sekaligus membantu siswa yang kesulitan membaca. Berikut data Rapor Pendidikan Kabupaten Ende



Berikut foto kegiatan di Kabupaten Ende



**Pelatihan Reading Camp bagi kepala sekolah dan guru jenjang sekolah dasar kab ende**



### 3. Inovasi

#### Sistem Layanan Terpadu BPMP Provinsi NTT (SASANDU)



Merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengumpulkan bukti Perjalanan Dinas dari seluruh pegawai baik ASN maupun PPNP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aplikasi ini menggunakan sistem berjenjang yang dimana inputan dari kepegawaian berdasarkan surat tugas dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, di mana setelah di setuju akan di lanjutkan untuk di proses dibagian keuangan.

Aplikasi SASANDU juga di gunakan sebagai Basisdata peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat mengunduh sertifikat kegiatannya. Peserta kegiatan diberikan link dan memasukan NIK untuk mendapatkan sertifikat hasil kegiatannya secara lebih fleksibel dan efisien.

Harapannya tahun 2025 pengembangan aplikasi ini dapat mengontrol kinerja dari masing-masing pegawai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 4. Penghargaan

### KPPN Kupang

- 01.** Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) pada triwulan I Tahun 2024



- 02.** Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Provinsi NTT Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang sebagai Satker Kategori Pagu Besar dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2024



## Internal BPMP

01. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih anugerah “APRESIASI DUTA MERDEKA BELAJAR SEBAGAI UPT Dedikatif”, dengan Kategori Inisiatif Pengembangan Strategi Pendampingan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).



02. Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Provinsi NTT Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang sebagai Satker Kategori Pagu Besar dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2024

- 02.** BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menunjang pengelolaan organisasi dibuktikan dengan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan dan PPNP Teladan pada tanggal 01 Juni 2024.



Di harapkan untuk ASN penerima penghargaan agar menjadi aparatur sipil negara yang handal dan professional dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu di Nusa Tenggara Timur. Begitu juga dengan PPNP agar dapat bekerja dengan baik, mempunyai inisiatif dan menjadi contoh untuk yang lain.

## 5. Program Crosscutting/Collaborative

**01.** 1.BPMP Prov NTT, BGP Prov. NTT, Pemkot Kota Kupang dengan 7 SEAMEO, dapat di lihat pada MoU di bawah ini:

**bgp Nusa Tenggara Timur**

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN

BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG

DAN

SEAMEO SEAMOLEUC

DAN

SEAMEO REC/PON

DAN

SEAMEO CECCEP

DAN

SEAMEO QITEP IN MATHEMATICS

DAN

SEAMEO QITEP IN SCIENCE

DAN

SEAMEO QITEP IN LANGUAGE

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN MUTU HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

Nomor : 0344/CT.20/AK.00.07/2024  
 Nomor : 0074/BT.16/KS.08.02/2024  
 Nomor : 04/BAG.KS-KR/2024  
 Nomor : 0358/SC/KS.00.00/2024  
 Nomor : 048/RECPON-MoU/01/2024  
 Nomor : 0172/SC7/KS.00.00/2024  
 Nomor : 075/SC/KS.00.00/2024  
 Nomor : 004/MOA/DIR/QH/01/2024  
 Nomor : 04/MOA/QH/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh empat (4-3-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HERDIANA : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPMP-NTT), berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25919/S/06/2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dan Pengangkatan sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPMP-NTT, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto No.57 A, Nakuten I, Krc. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KEEMPAT : SEAMEO QITEP IN LANGUAGE

Alamat : Jalan Gembira, Serwingg Sawah, Jagalsarna, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12040

Telepon : 62-21 78884106

Email : info@qitepindonesia.org

(2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan tertulis kepada PIHAK PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KESATU  
 HERDIANA

PIHAK KEDUA  
 VINA ARIYANTI

PIHAK KETIGA  
 SUMAREYONO

PIHAK KEEMPAT  
 KIZARASTUKAN

PIHAK KELIMA  
 SEAMEO QITEP IN LANGUAGE  
 R. DAN DIA-AN MUNIROH

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	
PIHAK KEEMPAT	
PIHAK KELIMA	

## 02. 1.BPMP Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Ende dengan SEAMEO CECCEP dapat di lihat pada MoU di bawah ini:



### 03 BPMP Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan SEAMEO CECCEP dapat di lihat pada MoU di bawah ini:






## 04 BPMP Provinsi NTT dengan Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada PKS di bawah ini:

 <p><b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b> ANTARA <b>BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b> <b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> DAN <b>FORUM TAMAN BACA MASYARAKAT (FTBM)</b> <b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b></p> <p><b>TENTANG</b> <b>PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENGUATAN LITERASI,</b> <b>PEMULIHAN PEMBELAJARAN, DAN PELATIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN,</b> <b>DAN PESERTA DIDIK JENJANG SD, SMP, SMA/SMK, DAN ANAK TIDAK</b> <b>SEKOLAH (ATS)</b></p> <p>Nomor: 1563/C7.20/AK.00.07/2024 Nomor: 140/PKS/Forum-TBMNTT/ XI /2024</p>	<p>Bagian Ketiga Masa Berlaku</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;</li> <li>2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini;</li> <li>3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang dimaksud menugahi Perjanjian Kerja Sama (PKS) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.</li> </ol> <p><b>BAB IX</b> <b>PENUTUP</b></p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) kali, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Herdiana, STC, MBA.</b> Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Polikarpus Jo</b> Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi NTT</p> </div> </div>
---	---



## 05 BPMP Provinsi NTT dengan Komunitas Film Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada PKS di bawah ini:

<p style="text-align: center;">   <b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b>  <b>ANTARA</b>  <b>BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b>  <b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>  <b>DAN</b>  <b>KOMUNITAS FILM KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>  <b>TENTANG</b>  <b>PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENGUATAN LITERASI,</b>  <b>PERFILMAN, AUDIO, PEMULIHAN PEMBELAJARAN, DAN PELATIHAN</b>  <b>TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK JENJANG SD, SMP,</b>  <b>SMA/SMK, DAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)</b> </p> <p style="text-align: right;">         Nomor : 1564/C7.20/AK.00.07/2024          Nomor : 507.A/XI/2024       </p>	<p style="text-align: center;">         Bagian Ketiga          Masa Berlaku  <b>Pasal 11</b>          1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.          2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.          3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>BAB IX</b>  <b>PENUTUP</b>  <b>Pasal 13</b>          Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asl, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.       </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>PIHAK KESATU</b>          Herdiana, ST, MBA,          Kepala (Bali) Penjaminan Mutu Pendidikan          Provinsi NTT       </div> <div style="text-align: center;">   <b>PIHAK KEDUA</b>          Yedida Astaria Letehera, S.IKom          Ketua Komunitas Film Kupang       </div> </div>
--	---





## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Selama tahun 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Dari empat Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran yaitu sasaran kegiatan 1 yaitu meningkatnya mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen terdiri dari IKK 1.1 (persentase satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya) dan IKK 1.2 (persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)). Capaian IKK 1.1 sebesar 13,12% telah melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 3,92% dan capaian IKK 1.2 sebesar 43,47% melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 35%.

Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari IKK 2.1 (predikat SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan IKK 2.2 (nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur). Capaian IKK 2.1 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK predikat A dan capaian IKK 2.2 sebesar 99,51 telah melampaui dari target yang ditetapkan dalam PK sebesar 95,55.

Dari segi kinerja keuangan, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil menggunakan anggaran sebesar Rp. 39.524.093.000 dari total Rp. 38.245.866.482 dengan persentase 96,77%. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan.

## PAGU

## ANGGARAN

2024

Rp. 39.524.039.000

■ Realisasi : 38.245.866.482 ■ Blokir : 1.158.403.000 ■ Saldo : 119.769.518



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		%
		%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	
SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	5916 Lembaga	379.840.000.00	5916 Lembaga	378.586.010.00	99,67
IKK 1.2	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	7678 Lembaga	17.384.952.000.00	7678 Lembaga	16.231.270.707.00	93,36
SK. 2 Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur						
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTT	A	21.759.247.000.00	A (82.10)	21.636.009.648.00	99,43
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	95.55		99.51		
Total			39.524.039.000.00		38.245.866.365.00	96,77

## Hasil evaluasi kinerja yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Percepatan Pencanangan Zona Integritas WBK/WBBM yang membutuhkan komitmen bersama mulai dari kepala hingga semua pegawai baik ASN maupun PPNPN BPMP Provinsi NTT
2. Sosialisasi tentang perencanaan, pengisian dan evaluasi SKP kepada seluruh pegawai yang masih menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap pegawai
3. Unit Layanan Teknis (ULT) belum bekerja maksimal dalam melayani stakeholder pendidikan
4. Perjanjian Kinerja Kepala di sosialisasikan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik
5. Adanya pergantian kepala sekolah PSP yang tidak sesuai ketentuan dan kurangnya kolaborasi PMO Dinas dan UPT
6. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dalam menindaklanjuti Regulasi SEB tiga menteri terkait pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari guru penggerak perlu dioptimalkan
7. Peningkatan fasilitasi persoalan pendidikan terkait dengan pemanfaatan Chromebook di satuan pendidikan kurang optimal, penyaluran informasi tentang dana BOSP yang belum lancar dan kurangnya sosialisasi terkait Verval Data ATS pada dashboard ATS (Anak Tidak Sekolah)
8. Keterkaitan dengan Pemda dan Mitra Pembangunan perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan pemahaman penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, dapat dikatakan bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal/tidak optimal. Selanjut kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025–2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan

## **Untuk meningkatkan kinerja organisasi, fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :**

1. Meningkatkan kinerja dan menanamkan budaya mutu kepada seluruh pegawai baik ASN maupun PPNPN BPMP Provinsi NTT;
2. Tujuan, sasaran dan strategi kegiatan/program yang akan dilakukan harus tepat sehingga dapat mendukung target kinerja Lembaga;
3. Koordinasi dan Sinergitas antar PMO, Koordinator Wilayah, PIC dan Subbag Umum dalam melaksanakan program/kegiatan perlu di tingkatkan;
4. Proses pemilihan pegawai berprestasi, pemberian penghargaan/reward dan peringatan/punishment kepada pegawai harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama;
5. Sesuai tugas dan fungsi BPMP Provinsi NTT akan melakukan koordinasi, advokasi, fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait pemanfaatan Chromebook di satuan Pendidikan yang kurang optimal, penyaluran informasi tentang dana BOSP yang belum lancar dan kurangnya sosialisasi terkait Verval Data ATS pada dashboard dan dalam menindaklanjuti Regulasi SEB tiga menteri terkait pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari guru penggerak perlu dioptimalkan.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Herdiana**

**Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kupang, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan  
Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi NTT,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Iwan Syahril  
NIP 197610262023211002



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Herdiana  
NIP 197612062008101001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.426.788.000,-
2.	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 18.201.195.000,-
Total Anggaran			Rp. 37.627.983.000,-

Kupang, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Iwan Syahril  
NIP 197610262023211002



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Herdiana  
NIP 197612062008101001



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan**  
**Provinsi NTT**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar**  
**dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herdiana

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Iwan Syahril


Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kupang, 11 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan  
Dasar dan Pendidikan Menengah  
  
Iwan Syahril

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi NTT  
  
Herdiana



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Balai**  
**Sertifikasi**  
**Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	35
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	Nilai	95.55

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 21.759.247.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 17.764.792.000
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp 39.524.039.000</b>

Kupang, 11 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan  
 Dasar dan Pendidikan Menengah  
 Iwan Syahril


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Penjaminan Mutu  
 Pendidikan Provinsi NTT  
 Herdiana



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**Laporan Kinerja Triwulan 1  
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1**

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55	Nilai	0	0



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



## **B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1**

### **1. [ SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Diseminasi Surat Pemberitahuan supervisi PDM 09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan
2. Penguatan Peran Bunda PAUD dalam rangka pemenuhan hak esensial anak bersama BPMP, BGP dan SEAMEO CECCEP
3. Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab/Kota

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Dinas Pendidikan membutuhkan jadwal kegiatan BPMP terkait dengan Gerakan Transisi PAUD-SD yang menyenangkan
2. Masih ada sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum memahami pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan SD;
3. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama belum melakukan sosialisasi tentang Implementasi kebijakan Gerakan Transisi PAUD– SD Yang menyenangkan

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Melakukan Zoom untuk memberikan gambaran atau informasi awal serta mitra pendidikan yang terlibat dengan Gerakan Transisi PAUD yang menyenangkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. BPMP-NTT dan BGP-NTT bersama dengan SEAMEO CECCEP melaksanakan kegiatan Penguatan Peran Bunda Paud, dalam Rangka Pemenuhan Hak Esensial Anak untuk Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan mengundang Pokja PAUD, DWP BPMP, Komite/pengelola PAUD, Staf BPMP dan Staf BGP.
3. Mendorong Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk menyampaikan ke Satuan Pendidikan dimulai dengan Diseminasi Surat Edaran dan pemanfaatan alat bantu berupa 7 Modul Pembelajaran , Video pembelajaran , Video Inspirasi, Booklet , Video contoh Praktik Baik pembelajaran untuk PAUD, RA/BA , SD/ MI serta 3 target perubahan dalam Gerakan Transisi PAUD-SD yang menyenangkan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



## 2. [ SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

### Progress / Kegiatan :

1. Sosialisasi percepatan pembentukan TPPK di satuan pendidikan dan satgas PPKSP
2. Reviu PERBUP tentang peningkatan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kebudayaan melalui penerapan kebijakan merdeka belajar di Kabupaten Ende
3. Koordinasi persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Persiapan Regulasi dan Sistem Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Tahun 2024
4. Koordinasi dengan BGP terkait optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan serta Zoom koordinasi dengan PMO Pemda
5. Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah
6. Zoom Rakor Pemetaan data sekolah sasaran program kampus mengajar di lanjutkan dengan Pelepasan Kampus mengajar Angkatan 7
7. Zoom Advokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait ARKAS 4.0 BOP; Sosialisasi BOP Keaksaraan; Pelatihan ARKAS/MARKAS/SIPlah pada pemerintah daerah
8. Pendekatan Kemitraan antara BPMP, BGP dan 7 Seameo Center untuk Kab. Kupang dan Kota Kupang
9. Mengadvokasi peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dilihat dari Progres Belajar dan Pemanfaatan Ajar dan Aktivitas Komunitas Belajar dalam Sekolah bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan pelaksana IKM
10. Tindak Lanjut kebijakan Program Guru Penggerak
11. Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas
12. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan tema Perencanaan dan Penganggaran Daerah

### Kendala / Permasalahan :

1. Progres pembentukan satuan tugas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) untuk Provinsi NTT masih sangat rendah
2. Pemerintah Kabupaten Ende membutuhkan peraturan bupati agar dapat menunjang kebijakan merdeka belajar
3. Hasil evaluasi PPDB tahun sebelumnya menjadi acuan untuk perbaikan PPDB tahun 2024 dengan menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan Permendikbud nomor 1 Tahun 2021 pasal 44 untuk provinsi NTT baru 9% yang membuat regulasinya
4. Tim PMO Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah hadir; Frekuensi pendampingan atau monitoring Tim PMO disdik sangat rendah



#### Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



5. Gubernur/Bupati/Walikota di pimpin oleh penjabat jadi harus ada Persetujuan Teknis; Ada pengawas yang sudah dilantik namun tidak bisa di input di SIMTENDIK yang akan berdampak pada haknya berupa tunjangan sertifikasi; Ada pemda (Kab. Malaka) tidak memiliki guru penggerak untuk mengisi kebutuhan kepala sekolah di wilayahnya
6. Satuan pendidikan tidak mengikuti kegiatan Rakor pemetaan data sekolah sasaran namun terlibat pada pemetaan data sekolah sasaran program kampus mengajar angkatan 7
7. Kurangnya kompetensi bendahara/operator Arkas; Pergantian Bendahara di tingkat satuan pendidikan; Penyedia yang sangat kurang, terutama UMKM yang belum mendaftar SIPLah sehingga harga belum terbentuk (mahal); Satuan pendidikan belum berani mencoba hal baru berbelanja secara online; Masih ada satuan pendidikan terdeteksi transaksi gantung di tahun 2023 serta Peran dinas yang belum maksimal
8. Kurangnya pelatihan atau training untuk guru terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik;
9. Progres guru yang mengakses PMM masih rendah; Sekolah pelaksana IKM belum memiliki Komunitas Belajar dalam sekolah dan yang sudah ada kurang aktivitas;
10. Masih rendah respon dari pemda terhadap pengangkatan GP; Terdapat perbedaan data real GP yang sudah diangkat menjadi KS/PS; Sebagian besar GP berasal dari sekolah swasta; Untuk Pengangkatan KS dari unsur P3K masih terkendala dengan pembayaran tunjangan fungsional KS akibat belum ada aturan turunan dari Kemenkeu
11. Masih ada Dinas Pendidikan yang belum membuat SK Unit Layanan Disabilitas karena menunggu pengesahan bupati; Dinas pendidikan belum melakukan sosialisasi tentang Permendikbudristek No. 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi penyandang Disabilitas
12. Dinas Pendidikan dan BAPPEDA kurang memahami isi dari Rapor Pendidikan sehingga tidak detail dalam menyusun Perencanaan Berbasis Data; Intervensi Bupati/Walikota/Gubernur dan DPRD sangat tinggi terhadap penganggaran daerah.

### Strategi / Tindak Lanjut :

1. BPMP Provinsi NTT mengadakan percepatan secara daring untuk satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan melalui GoogleMeet dengan mendampingi sekolah secara langsung;
2. Melakukan Reviu Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kebudayaan melalui Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar, Review Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPMP, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, Seameo Seamolec, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Reviu Draft Nota Kesepakatan Reading Camp antara BPMP dan Pemerintahan Kabupaten Ende beserta Lampiran Rencana Kerja, tanggal 29 Januari 2024 di Aula Kantor Bupati Ende.
3. Mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk menyusun Regulasi dan Sistem PPDB tahun 2024/2025 yang mana capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari semula sebesar 9% menjadi 48% namun masih tertinggal jauh dibawah provinsi yang lain.
4. Membuat jadwal rutin Pendampingan ke PMO Pemda secara Luring maupun Daring
5. Menunggu Surat Edaran Bersama antara Mendikbudristek, Kemendagri dan BKN untuk mempersingkat alur pengangkatan GP menjadi KS/PS, berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengajuan formasi pengawas yang sudah disetujui oleh GTK ke MempanRB sebagai syarat untuk diinput dalam Simtendik, Menginformasikan kepada UPT terkait (BGP) untuk memprioritaskan daerah yang tidak memiliki GP dalam seleksi Guru Penggerak
6. Optimalisasi keterlibatan unsur-unsur seperti LLDIKTI, Koordinator Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan PIC Kabupaten; Pertemuan FKK bulanan sebagai bentuk evaluasi sekaligus refleksi bagi semua pihak Tim Kampus Mengajar;



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



7. Memberikan pendampingan baik secara luring maupun daring secara berkelanjutan, Koordinasi dengan terkait (Dinas Koperasi, Perindag) untuk mensosialisasikan pembelanjaan daring serta Memberikan penguatan dan penyamaan persepsi bagi dinas pendidikan terkait pengelolaan dana BOSP
8. BPMP bersama SEAMEO SEAMOLEC mengadakan kegiatan pelatihan Program Pendampingan Microlearning dimana peserta Dinas pendidikan dan satuan pendidikan berpartisipasi menyusun RTL dan melakukan pengimbasan kepada PTK di kab/Kota masing-masing terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
9. Mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk mengawal peningkatan kualitas pemanfaatan PMM dan fitur-fitur yang menunjang progres belajar dan Pemanfaatan Perangkat ajar serta pentingya komunitas belajar dalam sekolah;
10. Mengadvokasi Pemda agar mengangkat GP yang merupakan pemimpin pembelajaran menjadi KS/PS; Mensinkronkan data GP yang sudah diangkat menjadi KS/PS di sistem dengan data real di lapangan (petugas membawa data terupdate dari daerah); Mendorong guru di sekolah negeri( PNS/ASN) untuk mengikuti seleksi guru penggerak
11. Melakukan Sosialisasi ke Dinas Pendidikan bersama dengan pengawas tentang Permendikbudristek No. 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas serta Pendampingan pengisian Link Ketersediaan ULD di Kabupaten/Kota
12. Melakukan Advokasi ke Pemerintah Daerah bagian perencanaan dan penganggaran berdasarkan indikator prioritas SPM bidang pendidikan yang perlu ditingkatkan serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah melalui Rapor pendidikan.

### **3. [ SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur ] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Rapat Umum Transformasi SDM 2024
2. Menyampaikan Laporan Kinerja BPMP Provinsi NTT Tahun 2023
3. Menyusun Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi NTT Tahun 2024
4. Sosialisasi Perjanjian Kinerja Kepada seluruh ASN dan PPNPN BPMP Provinsi NTT
5. Menyusun Rencana Aksi BPMP Provinsi NTT Tahun 2024
6. Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP BPMP Provinsi NTT Tahun 2023
7. Rapat Tim ZI WBK/WBBM serta Study Tiru di BBPMP Provinsi Jawa Tengah

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Belum semua ASN dan PPNP memahami tugas dari setiap PDM



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Tahapan program/kegiatan belum sesuai SOP
3. Pemahaman SOP setiap jabatan masih rendah
4. Pemahaman tentang apa itu ZI WBK/WBBM masih rendah

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Pengimbasan hasil PDM oleh PIC lama dan penyampaian objective 2024 oleh Lead PDM yang baru dan diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN BPMP
2. Melakukan kegiatan senin belajar untuk membagi informasi setelah mengikuti kegiatan dari pusat
3. Melaksanak reuiu atau bedah SOP agar semua ASN paham jabatannya masing-masing
4. Pemenuhan dokumen-dokumen ZI-WBK sesuai LKE sesuai area

#### **4. [ SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur ] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Rapat Perencanaan bersama dengan PIC PDM
2. Penyampaian Laporan Keuangan BPMP Provinsi NTT tepat waktu
3. LPJ Bendahara tepat waktu setiap bulan
4. Melaporkan capaian output di aplikasi SAKTI tiap bulan.

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala atau permasalahan yang di hadapi adalah setiap PDM sudah mengisi jadwal program/kegiatan di MS Project dan sudah disesuaikan dengan rencana penarikan dana di Halaman III DIPA tapi kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi atau tindak lanjut yang di lakukan adalah setiap PDM berkomitmen terhadap jadwal program/kegiatan yang sudah disusun sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan Halaman III DIPA



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



### C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419546.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7.678	810	6.868	17.821.355.000	2.148.980.845	15.672.374.155
[419546.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5.916	2.055	3.861	379.840.000	141.047.920	238.792.080
[419546.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	160.323.160	314.676.840
[419546.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	16.289.675.000	3.332.027.725	12.957.647.275
[419546.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	873.500.000	0	873.500.000
[419546.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	1.788.613.000	0	1.788.613.000
<b>Total</b>					<b>37.627.983.000</b>	<b>5.782.379.650</b>	<b>31.845.603.350</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Advokasi dan pendampingan ke pemerintah daerah lebih diintensifkan dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan dan program prioritas Kemdikbudristek
2. Meningkatkan kapasitas SDM baik PNS dan PPNNP terkait pelaksanaan program prioritas Kemdikbudristek dan komitmen bersama untuk pelaksanaan ZI-WBK
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Tim Kerja, PIC dan Subbag Umum dalam melaksanakan program/kegiatan

Kupang, 30 Mei 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Herdiana  
NIP 197612062008101001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





**Laporan Kinerja Triwulan 2  
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2**

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55	Nilai	0	0

## **B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2**

### **1. [ SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Mitra daerah untuk mengadvokasi satuan pendidikan dan masyarakat terkait perubahan pembelajaran
2. Sosialisasi dan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivasi Forum Komunikasi Transisi PAUD-SD
3. Persentase satuan pendidikan tidak melakukan tes calistung untuk sekolah negeri 152,47% atau 1.020 dan masih menerapkan tes calistung 16,89% atau 113 dari 1.133 satuan pendidikan dan yang tidak melakukan tes calistung untuk sekolah swasta 130,52% atau 449 dan masih menerapkan tes calistung 13,08% atau 45 dari 494 satuan pendidikan.
4. Capaian Pengimbasan Bimtek Perubahan Pembelajaran sebagai berikut:
  - Jumlah Guru Terimbas 1431 org (86,2 %) dari minimal 1.660 Guru
  - Jumlah Guru Yang sudah Mengimbas 43 Orang (51 %) dari 83 orang Guru Bimtek
  - Jumlah Guru yang belum Mengimbas 40 Orang (48.2 %) dari 83 orang Guru Bimtek
5. Kabupaten yang 100% sudah mengimbankan perubahan pembelajaran adalah Kabupaten Lembata, Rote Ndao dan Alor dan Kabupaten yang belum melakukan pengimbasan adalah Kabupaten Malaka dan Sabu Raijua

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Kurangnya koordinasi antara mitra daerah dengan Dinas Pendidikan sehingga pemahaman satuan pendidikan dan masyarakat masih rendah terkait perubahan pembelajaran pada gerakan transisi PAUD-SD yang menyenangkan
2. Forum Komunikasi (Forkom) Transisi PAUD – SD yang sudah ada kurang aktif dalam mengadvokasi satuan pendidikan
3. Berdasarkan Dasbor PPDB SD masih ada 113 satuan pendidikan negeri yang melakukan tes calistung hal ini kemungkinan dikarenakan satuan pendidikan memang melaksanakan tes calistung pada saat pelaksanaan PPDB atau satuan pendidikan salah saat mengisi link PPDB

## **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Mengundang Ketua Forkom, Bunda PAUD/pokja bunda PAUD, PIC Transisi PAUD-SD Dinas Pendidikan se NTT serta mitra BPMP yaitu Inovasi, Cakrawala, Tuna Aksara, Seameo Ceccep dan Dharma Wanita Persatuan UPT Kemdikbudristek terkait perubahan pembelajaran pada gerakan transisi PAUD-SD yang menyenangkan pada kegiatan Gebyar Transisi PAUD-SD
2. Kemitraan BPMP bersama Kota Kupang dan 6 Kabupaten (Kab.Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ende) melakukan penandatanganan MOU dengan SEAMEO CECCEP untuk mengmasifkan Gerakan Transisi PAUD-SD yang menyenangkan.

## **2. [ SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

### **Progress / Kegiatan :**

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Kegiatan Pemetaan Sekolah Pelaksanaan PSP dan Sekolah Imbas serta Koordinasi PMO dengan Pemerintah Daerah;
  - Kegiatan Workshop Pengimbasan PSP Angkatan 1;
  - Capaian PSP Angkatan I sudah 94% atau 88 sekolah dari 94 sekolah PSP angkatan 1 sebagai sekolah pengimbas.
2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Persiapan Pelaksanaan Festival Kurikulum Merdeka;
  - Kegiatan Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - Kegiatan Pameran Bulan Merdeka Belajar berkolaborasi dengan UPT Kemdikbudristek, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan dan Mitra Pembangunan dilaksanakan di BPMP Provinsi NTT;
  - Kegiatan Puncak Festival Kurikulum Merdeka terdiri dari Potret Cerita Kurikulum Merdeka, Demo Karya Guru dan Gelar Wicara Pendidikan kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba seperti lomba Mewarnai untuk jenjang PAUD, menggambar untuk jenjang SD, Solo Vokal untuk jenjang SMA/SMK dan lomba Video TikTok on the spot;
  - Capaian belajar di PMM dengan kategori Baik 0,07%, Cukup Baik 78,6% dan perlu ditingkatkan 21,33% dengan target Baik 50%;
  - Capaian Pemanfaatan Perangkat Ajar di PMM dengan kategori Baik 66,96%, Cukup Baik 13,9% dan perlu ditingkatkan 19,14% dengan target Baik 75%.
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah Pelaporan Dana BOSP Tahap 1 dan Persiapan Salur Tahap 2 Tahun 2024;
  - Penyaluran BOSP Tahap 2 yaitu Siap Salur 80,92% atau 10.797 satuan pendidikan dan Belum Siap Salur 19,08% atau 2.545 satuan pendidikan dari target 90%;

- Pengguna SIPlah yaitu Total pengguna 4.170 atau 31,25% dan Belum Menggunakan 9.172 atau 68.75%.
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
- Kegiatan Microlearning tahap 3 bersama SEAMEO SEAMOLEC;
  - Kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah untuk Transformasi Digital Dalam Pembelajaran di 22 Kabupaten/Kota;
  - Capaian Aktivasi Akun Belajar.Id yaitu Akun PTK Teacher 90,01% atau 113.909 satuan pendidikan, Akun PTK Admin 80.26% atau 23.808 satuan pendidikan dan Akun Peserta Didik 45.60% atau 257.493 satuan pendidikan dengan target 100% satuan pendidikan;
  - Capaian Adopsi Produk Google Workspace for Education (GWFE) sudah 11.156 atau 81% dengan target 100% satuan pendidikan.
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
- Kegiatan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Aktivitas Komunitas Belajar dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan;
  - Capaian Rapor Pendidikan yang Sudah Akses 86% atau 9.690 satuan pendidikan dan belum akses 14% atau 1.517 satuan pendidikan dari 11.207 satuan pendidikan.
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
- Capaian SPM tahun 2024 untuk Tuntas Pratama (70-79) adalah Kabupaten Nagekeo, Ngada, Kota Kupang dan Sumba Tengah, Tuntas Muda (60-69) adalah Lembata, Rote Ndao, Flores Timur, Manggarai, Sikka dan Manggarai Timur dan Belum Tuntas (0-59) adalah TTU, Sabu Raijua, Sumba Timur, Manggarai Barat, Ende, Sumba Barat, Alor, Kab.Kupang, Belu, TTS, SBD, Malaka dan Provinsi;
  - DAU Spesifik Grand Tahun 2024 dialokasikan 13 % untuk mendorong Pemenuhan Indikator Prioritas SPM Pendidikan.
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
- Kegiatan Diskusi terpumpun pendampingan PPDB dan Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas untuk Pemerintah Daerah;
  - Capaian Persiapan Regulasi Juknis PPDB oleh 23 Pemda dengan rincian 21 pemda ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan 2 pemda yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (Bupati);
  - Pelaksanaan Komitmen bersama untuk pelaksanaan PPDB yang Obyektif, Transparan dan akuntabel dengan menggandeng Ombudsman Wil. NTT, Kejati NTT, Polda NTT, Kejari Kota Kupang, Polresta Kota Kupang dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/kota se-NTT;
  - Capaian Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah adalah 40% dari jumlah Guru Penggerak di Provinsi NTT berjumlah 2.799 guru;
  - Capaian Pembentukan Satgas PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) mencapai 52,17% atau 12 dari 23 Pemda;
  - Capaian Pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) mencapai 87,07% atau 11.165 satuan pendidikan dari 14.182 satuan pendidikan;
  - Program Kerjasama Kemitraan untuk Penguatan Literasi dan Numerasi di tiga Kabupaten perbatasan antara negara Indonesia dan Timor Leste antara BPMP NTT, BGP NTT, Kabupaten Belu, Malaka dan TTU bersama Gramedia akan mulai dilakukan pada Tahun 2025;
  - Kerjasama Strategis BPMP NTT, Dinas Pendidikan Provinsi NTT dengan Google Indonesia merupakan upaya transformasi pendidikan digital di NTT;

- Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan Tahap IV dihadiri unsur Dinas Pendidikan Provinsi, kab/kota, Universitas Nusa Cendana, Universitas Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, BPMP NTT, BGP NTT, Balai Bahasa NTT, LLDIKTI Wilayah XV NTT dan Balai Pelestarian Kebudayaan

8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]

- Kegiatan Workshop Uji Kesetaraan;
- Kegiatan Monev Pelaksanaan Uji Kesetaraan di 22 Kabupaten/Kota yaitu Paket C di 10 Kabupaten dan Paket A/B di 12 Kabupaten dengan sasaran PKBM dan SKB pelaksana UK.

9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]

- PDM-08 Pusat melaksanakan kegiatan Bimtek Percepatan Partisipasi Pendidikan (Program PAUD dan Wajar 12 Tahun) dengan mengundang 8 Kabupaten (Kab.Kupang, TTU, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Ende, Manggarai Barat, Manggarai) karena capaian AKS (Angka Kesiapan Sekolah) dan APS (Angka Partisipasi Sekolah) sudah mendekati target sehingga di dorong untuk mencapai target selama satu tahun kedepan.

10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]

- Kegiatan Supervisi Program Kampus Mengajar angkatan 7 di 21 kabupaten/kota dengan responden Kepala Sekolah, Guru Pamong, Mahasiswa, dan DPL per satuan penugasan dengan jumlah sekolah yang disupervisi 49 sekolah.
- Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT Program Kampus Mengajar Angkatan 7 (Pelepasan dan Pembekalan) dengan total jumlah mahasiswa 744 orang, DPL 82 orang, 38 PT, dan 163 satuan penugasan

11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]

- Kegiatan Semarak Gerakan Sekolah Sehat yang dilaksanakan di BPMP bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional;
- Advokasi Penguatan Kampaye Sekolah Sehat dari UPT ke Pengawas dan TP UKS Provinsi dan Kab/Kota;
- Hasil Asesmen awal 7,92% dari target 80 % satpen mengetahui Gerakan Sekolah Sehat dan 71,29% dari target 30 % satpen mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat;
- Capaian satpen binaan meningkat status kesehatan dari KUNING ke HIJAU untuk 3 sehat (bergizi, fisik, imunisasi) untuk NTT 34,27% dari target 50% dan satpen binaan meningkat status kesehatan dari MERAH ke KUNING untuk 2 sehat (jiwa dan lingkungan) untuk NTT 52,70% dari target 50%.

12. [PDM-12\_Pendidikan Inklusi]

- Pelatihan Mandiri Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif melalui PMM yaitu 1. Memulai Materi 3577 Guru, 2. Post Test 1465 Guru, 3. Lulus Post Test 799, 4. Unggah Aksi Nyata 471 Guru dan 5. Ketuntasan Topik 76 Guru;
- Capaian Provinsi NTT yang sudah mempunyai SK Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah 17 Kabupaten, 2 Kabupaten perlu direvisi dan 3 Kabupaten belum ada.

13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]

- Midline Data Cutoff Sinkron Semester 2 tahun 2024 (Bln Juni) untuk Indikator Kelengkapan : 83.58 %, Indikator Validitas : 73.78 %, Indikator Muktahir : 80.05 %;
- Status Indeks Kualitas Dapodik mengalami Perubahan Turun Dari 81.19 % menjadi 78.60 % ada Penurunan Indeks 2.59 %.

## **Kendala / Permasalahan :**

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Adanya sekolah imbas yang tidak bersedia mendapatkan pengimbasan PSP, Jarak tempuh sekolah imbas relatif jauh dan kepala sekolah pengimbas di mutasi;
  - Mutasi Kepala sekolah PSP angkatan 2 dan 3 karena lulus PPPK pada sekolah swasta sehingga kepala sekolah pengganti belum bisa login SIM PKB untuk mengakses LMS
2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - Belum membudayanya Komunitas Belajar Dalam Sekolah yang bisa menjadi tempat belajar dan berbagi sesama guru
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Beberapa daerah terlambat dalam memberikan rekomendasi penyaluran dana BOSP tahap I
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - Untuk sekolah penerima Bantuan TIK (Chromebook) masih ada miskonsepsi terkait pemanfaatan perangkat hanya untuk ANBK
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - Jumlah satuan pendidikan terbanyak yang belum mengakses Rapor Pendidikan di jenjang PAUD dan PKBM
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Bapelitbangda di 22 Kabupaten/Kota kurang optimal sehingga Aplikasi SIPD masih kosong.
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - Untuk PPDB kendala yang dihadapi adalah masih ada satuan pendidikan yang menerima siswa baru melebihi rombongan belajar di DAPODIK;
  - Untuk GP menjadi KS/PS yang menjadi kendala adalah terkait dengan masalah suksesi kepemimpinan daerah sehingga meskipun sudah ada Surat Edaran Bersama 3 Menteri (Kemendikbudristek, Kemendagri dan BKN) terkait pengangkatan pejabat yang di dalamnya termasuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah belum dilakukan secara maksimal;
  - Untuk pembentukan PPKSPS kendala yang dihadapi adalah 13 Pemda sudah memiliki SK namun belum mendaftarkan di Dashboard PPKSPS dan Untuk pembentukan TPPK adalah satuan PAUD memiliki PTK terbatas sehingga untuk pembentukan TPPK harus bergabung antar beberapa satuan pendidikan
8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Masih banyak peserta didik non formal dan informal yang belum memahami uji kesetaraan (UK);
  - Dinas Pendidikan kurang optimal memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Uji kesetaraan seperti masih ada pemadaman listrik pada saat pelaksanaan UK;
  - Penentuan lokasi pelaksanaan belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti jarak tempuh bagi peserta ujian dan jaringan internet di lokasi kegiatan
9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - Pemahaman Pemda tentang ATS (Angka Tidak Sekolah) masih kurang;
  - Pemenuhan indikator APS (Angka Putus Sekolah) khususnya kesetaraan karena Dinas Pendidikan kesulitan mendapatkan data siswa yang putus sekolah.

10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - Pemetaan DPL tidak sesuai dengan tempat domisili dari DPL;
  - Keterlibatan koordinator kampus dari PT belum optimal;
  - Bantuan Biaya Hidup (BBH) bagi mahasiswa dicairkan secara bertahap dan tidak merata mengakibatkan banyak mahasiswa mengeluh;
  - Kegiatan Festival dan Kemah Literasi dalam Rencana Aksi Mahasiswa (RAK) belum dilakukan karena terbentur jadwal ujian sekolah bahkan sebagian mahasiswa tidak melakukan di sekolah dikarenakan mahasiswa tidak memiliki dana.
11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - Dinas Pendidikan kurang aktif menyampaikan informasi tentang GSS ke satuan binaan dan non binaan;
  - Pemahaman beberapa kepala sekolah tentang GSS masih rendah.
12. [PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
  - Masih ada 3 kabupaten (Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur dan Kab. Belu) yang belum membuat SK ULD
13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
  - Masih Banyak data Anomali pada kualitas entitas indikator dapodik berdasarkan Dashboard Indikator Kualitas Dapodik

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan agar memilih satuan pendidikan yang bersedia menerima imbasan walaupun lintas kabupaten
  - Melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan agar sekolah swasta melakukan pendekatan ke yayasan untuk menunda mutasi kepala sekolah PSP
2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - BPMP mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk membudayakan Komunitas Belajar Dalam Sekolah yang bisa menjadi tempat belajar dan berbagi sesama guru.
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Membuat kegiatan daring secara rutin dengan tim manajemen BOSP Dinas Pendidikan Kab/kota
  - Melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tentang manfaat berbelanja di SIPlah secara masif.
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - Dinas Pendidikan Kab/Kota sudah memiliki akses dashboard dan langsung menghubungi sekolah yang jumlah akun tersedia banyak sedangkan tingkat aktivasi rendah
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - Pembentukan Fasilitator Daerah Rapor Pendidikan dari unsur Guru dan Dinas diharapkan mampu mendorong dan menjadi agen perubahan di daerah dalam hal membantu satpen yang terkendala mulai dari akses sampai pada perencanaan sesuai kebutuhan
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - Melakukan Advokasi persuasif dengan Dinas Pendidikan dan Bapelitbangda agar Aplikasi SIPD dapat diselesaikan bersama-sama

7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - BPMP memfasilitasi permasalahan di 22 kabupaten/kota yang menerima siswa baru melebihi rombongan belajar di DAPODIK untuk bersurat ke pusat agar di tambahkan
8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Mengadvokasi Dinas Pendidikan tentang POS Uji Kesetaraan kepada PKBM agar Persiapan dan pelaksanaan Uji UK berjalan dengan baik.
9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - Mendampingi Pemda agar lebih memperhatikan anak Tidak Sekolah agar mendapatkan pendidikan yang layak
10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - Konsultasi ke TIM Kampus Mengajar Angkatan 7 perihal pemetaan DPL dan mengusulkan agar selanjutnya pelibatan BPMP saat pemetaan DPL
  - Koordinator kampus mengajar dari PT di masukan ke dashboard beserta nomor kontak sehingga memudahkan BPMP mengunduh daftar tersebut untuk mempermudah koordinasi dengan pihak PT
  - Koordinasi dengan TIM Pusat untuk solusi BBH mahasiswa kemudian menginfokan ke group mahasiswa
  - Solusi dari TIM Kampus Mengajar untuk memberikan tambahan waktu agar festival bisa dilaksanakan setelah jadwal ujian sekolah.
11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - Melakukan Advokasi secara masiv ke Dinas Pendidikan melalui daring agar sekolah binaan dan non binaan mendapatkan informasi terupdate
  - Melakukan Sosialisasi melalui media-media cetak maupun online agar satuan pendidikan paham tentang gerakan sekolah sehat (GSS)
12. [PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
  - Melakukan Advokasi ke kabupaten yang belum membentuk SK ULD, karena akan mempengaruhi prosentase provinsi
13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
  - Melakukan Sosialisasi kepada SDM Pendataan yaitu operator dapodik Dinas Pendidikan dan Operator Dapodik satuan pendidikan agar memastikan data pendidikan lengkap, valid dan mutakhir dengan melakukan verifikasi dan validasi secara berkala

### **3. [ SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur ] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Senin Belajar yang telah diganti nama menjadi "SEIRAMA" yang merupakan akronim dari “Senin Informasi, Refleksi Hasil Kerja Bersama” dilakukan secara Rutin setiap hari Senin diawali dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan SEIRAMA.
2. Penyusunan Pengukuran Kinerja Triwulan I
3. Pendampingan dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

#### 4. Uji Publik Dokumen Layanan Publik ZI-WBK BPMP Provinsi NTT

##### **Kendala / Permasalahan :**

1. Belum semua ASN memahami tugas dari PDM 01 sampai dengan PDM 14
2. Belum ada SOP terbaru, sehingga pemahaman SOP setiap jabatan masih kurang
3. Pemahaman tentang ZI WBK/WBBM masih kurang.

##### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Semua ASN Wajib mengikuti SEIRAMA karena penyampaian materi dari ASN yang ditugaskan mengikuti kegiatan undangan pusat.
2. Merubah strategi pelaksanaan penugasan di daerah agar semua ASN belajar semua PDM agar tagihan pekerjaan dari PDM lain dapat diselesaikan bersama.
3. Melakukan perbaikan fisik sarana dan prasarana untuk menunjang Pembangunan ZI-WBK agar memenuhi kualitas standar pelayanan kepada pelanggan
4. Pemenuhan dokumen-dokumen ZI WBK sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

#### **4. [ SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur ] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

##### **Progress / Kegiatan :**

1. Rapat Rutin antara PMO dan PIC PDM setiap minggu ke satu dan ke ketiga setiap bulan untuk membahas kegiatan bulan berikutnya
2. Malaporkan capaian output di aplikasi SAKTI tepat waktu setiap bulan
3. LPJ Bendahara Pengeluaran tepat waktu setiap bulan
4. Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Provinsi NTT Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang sebagai Satker Kategori Pagu Besar dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2024
5. Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) pada triwulan I Tahun 2024

**Kendala / Permasalahan :**

1. PDM sudah membuat jadwal kegiatan dan sudah disesuaikan dengan rencana penarikan dana di Halaman III DIPA tapi kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran
2. Anggaran Belanja Modal di blokir sampai bulan Maret dan buka blokir di bulan April

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perubahan yang terjadi.
2. PIC PDM berkomitmen terhadap jadwal program/kegiatan yang sudah disusun sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan Halaman III DIPA
3. Anggaran Belanja Modal untuk Renovasi Gedung Kantor proses lelang di LPSE Kemendikbudristek pada bulan Mei dan penandatanganan kontrak per 01 Juli 2024

**C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2**

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419546.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7.678	0	7.678	17.821.355.000	4.226.039.175	13.595.315.825
[419546.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5.916	0	5.916	379.840.000	197.030.920	182.809.080
[419546.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	420.675.560	54.324.440
[419546.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	16.289.675.000	8.348.832.408	7.940.842.592
[419546.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	873.500.000	0	873.500.000
[419546.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	1.788.613.000	0	1.788.613.000
<b>Total</b>					<b>37.627.983.000</b>	<b>13.192.578.063</b>	<b>24.435.404.937</b>

#### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Peningkatan Kapasitas SDM seluruh ASN dan PPNP di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dilakukan melalui SEIRAMA.
2. Koordinasi antara PMO Katimker PIC PDM dan Koordinator Wilayah harus tetap ditingkatkan dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan.
3. Laporan Umum kegiatan yang telah dilaksanakan agar diselesaikan oleh PIC PDM setelah kegiatan dilaksanakan.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT,



Herdiana

NIP 197612062008101001



### Laporan Kinerja Triwulan 3 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

#### A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35	%	0	0
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur</b>				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55	Nilai	0	0

#### B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

##### **[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

##### **[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

##### **Progress/Kegiatan**

1. Webinar Penguatan MPLS SD Kelas Awal
2. Tindak Lanjut Bimtek UPT BPMP NTT ke Satuan Pendidikan dan Pendampingan Pengawas dalam Pembelajaran Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan

##### **Kendala/Permasalahan**

1. Untuk memastikan MPLS dilaksanakan dengan cara yang aman dan nyaman dan mendukung perkembangan anak
2. Untuk memastikan bahwa 3 target perubahan dalam Gerakan Transisi PAUD SD sudah dilaksanakan pada satuan pendidikan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, membiasakan diri dengan jadwal dan kegiatan sekolah, serta mengenal guru dan staf
2. Melakukan sosialisasi materi Penguatan Kemampuan 6 Fondasi siswa di Kelas Awal sekolah asar serta pemantauan pelaksanaan pembelajaran di kelas awal melalui observasi dan wawancara

**[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

**[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

## Progress/Kegiatan

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Kegiatan Pendampingan Forum Pemangku Kepentingan PSP Angkatan 2 dan 3
  - Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satuan Pendidikan
  - Refleksi Pelaksanaan PSP oleh Pemda
2. [PDM-01\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - Kegiatan Advokasi IKM bagi Mitra Pembangunan
  - Pendampingan IKM bagi Satuan Pendidikan dengan sasaran 11 Kabupaten/Kota
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Kegiatan Penguatan Fasilitator Daerah Untuk SDS (Sumber Daya Sekolah)
  - Bimtek Platform SDS (ARKAS & SIPLah)
  - Webinar Sosialisasi HPP ARKAS dan SIPLah
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - Kegiatan Penguatan Komunitas Belajar.id dan Rakor PemanTIK.
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - Kegiatan Webinar Unduh Rapor Pendidikan
  - Pendampingan satpen yang belum unduh rapor pendidikan dengan skema kumpul di titik desa/kecamatan
  - Monitoring dan Evaluasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - Kegiatan Pendampingan Realisasi SPM Semester I Tahun 2024
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - Pemantauan Pelaksanaan PPDB TA. 2024/2025
  - Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB
  - Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan Pendidikan (PPKSPS)
8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Workshop Kebijakan Assesmen Nasional dan Sulingjar serta Penguatan TIM Helpdek Assesmen Nasional dan Sulingjar Tahun 2024
  - Pemantauan Persiapan Pelaksanaan AN dan Sulingjar Tahun 2024 dan serta pendampingan satpen yang tidak mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2024
9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - Advokasi Pemda Terkait Capaian Renstra 2023.
10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - Peningkatan Kapasitas Fasilitator Daerah Penguatan Literasi dan Numerasi
  - Pelepasan dan Pembekalan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8
  - Penguatan Komunitas Belajar Antar Satuan Pendidikan sebagai Strategi Penguatan Literasi dan Numerasi jenjang SD di Kota Kupang
11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - Pendampingan Pelaksanaan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) tahun 2024
  - Pengisian Instrumen Asesmen Midline Sekolah Non Binaan GSS
  - Pendampingan dan Visitasi Ke satuan pendidikan Binaan GSS Tahun 2024
  - Advokasi Daring Penulisan Praktik Baik Implementasi GSS (Pembiasaan 5 Sehat di Satuan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pendidikan Binaan)

12. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]

- Hybrid Pendampingan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang
- Data Akses PBPI per 30 September 2024 , Memulai materi (4827), Memulai post test (2113), Lulus Post test (1219), Unggah Aksi Nyata (764) dan Ketuntatasan topik (168)
- 23 Pemda sudah memiliki SK ULD.

13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]

- Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Data Dapodik; Uji Petik Anomali Data

## Kendala/Permasalahan

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]

- Kehadiran Peserta dari satuan pendidikan di kegiatan Forum Pemangku Kepentingan dari Pemda belum maksimal karena masa transisi jabatan
- Belum semua sekolah pelaksana PSP menyerahkan data analisis hasil Rapor Pendidikan ke PIC PSP Dinas
- Terdapat 1 sekolah PSP angkatan 1 di Kab. Manggarai Timur yang belum melakukan pengimbasan secara luring

2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]

- Untuk mengetahui peran mitra pembangunan (30 mitra) dalam mendukung program prioritas kemendikbudristek
- Satuan pendidikan pelaksana IKM belum menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka

3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]

- Keterbatasan SDM untuk mendampingi satuan pendidikan yang paham tentang Arkas dan SIPLah di Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan Arkas dan SIPLah
- Masih ada satuan pendidikan yang belum siap salur tahap 2 (bermasalah ARKAS)
- Satuan pendidikan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait Halaman Pemetaan Pembelanjaan

4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]

- Belum adanya koordinasi antara BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam ekosistem pemanfaatan TIK di daerah

5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]

- Dari 1.400 satuan pendidikan yang belum unduh hanya 300 satuan pendidikan yang mengikuti webinar dikarenakan akses sekolah yang belum unduh menjadi masalah
- 6 kabupaten di NTT yang jumlah satuan pendidikan belum mengakses masih tergolong banyak 682 satuan pendidikan
- Satuan pendidikan yang menjadi sampel belum sepenuhnya memanfaatkan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan

6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]

- Pelaporan realisasi SPM belum sesuai waktu pelaporan yang ditetapkan yaitu s.d tanggal 20 bulan berikutnya pada triwulan yang berkenaan melalui Web Realisasi (e-SPM)

7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]

- Proses Pendaftaran, Proses Seleksi, Proses Pengumuman, Daftar Ulang PPDB belum sesuai prosedur
- 2 Kabupaten yang tidak hadir belum diterima Laporan PPDB oleh PIC PPDB BPMP NTT
- Masih ada satuan pendidikan yang melakukan kekerasan fisik dan non fisik, verbal dan non verbal dan tidak dilaporkan ke Tim Satgas PPKSPS

8. PDM-06\_Asesmen Nasional]

- Masih kurangnya Pemahaman Pemda terkait AN sehingga Pemda belum mengambil solusi bagi satuan pendidikan yang tidak meleaksanakan AN dan Sulingjar
- Untuk memastikan satuan pendidikan tentang kesiapan peserta didik, panitia, infrasutruktur, TIK, listrik, dan jaringan listrik

9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]

- Masih ada pemda yg belum mengetahui terkait capaian renstra 2023 (AKS,APS, dan APK) serta



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

terkait data ATS (Angka Tidak Sekolah)

10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]

- Miskonsepsi tentang Literasi dan Numerasi untuk penyusunan aksi nyata di Komunitas belajar satuan pendidikan
- Jarak dan lokasi sekolah penugasan bagi mahasiswa yang belum sesuai dengan domisili dari mahasiswa kampus mengajar angkatan 8
- Belum terbentuknya komunitas belajar jenjang SD di kota kupang

11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]

- Masih 50% dari 96 satuan pendidikan binaan yang belum melakukan tes kebugaran dan menginput hasil tes di Link Pelaksanaan Asesmen Kebugaran
- Masih 17 dari 133 satuan pendidikan non binaan yang tidak mengisi instrumen asesmen Midline
- Untuk mengetahui satuan pendidikan sudah melakukan dan mengembangkan pemenuhan 5 sehat ( sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan) di sekolah binaan GSS
- Masih ada sekolah binaan GSS yang terkendala jaringan internet untuk penulisan praktek baik

12. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]

- Masih banyak Sekolah yang belum mengakses pendidikan berjenjang Pendidikan Inklusi di PMM

13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]

- Masih terdapat anomali data dan residu data pada entitas dapodik sehingga mempengaruhi peningkatan Indeks Kualitas Data
- Terdapat data yang tidak sesuai dengan hasil uji petik data dapodik dan hasil uji lapangan operator yang baru diangkat belum paham dalam menginput data yang sesuai

## Strategi/Tindak Lanjut

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]

- Mengundang perwakilan peserta dari pihak PMO Disdik Kab/Kota/Provinsi dan satpen PSP Angkatan 2 dan 3 dilakukan dengan moda Hybrid
- BPMP memberikan hasil Rapor Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan membimbing untuk dianalisis
- Melakukan pertemuan secara daring Tim PMO BPMP, Tim PMO Dinas Kab. Manggrai Timur, dan Kepala sekolah yang belum laksanakan pengimbasan secara luring

2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]

- Mengadvokasi dan menyamakan persepsi antara BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mitra Pembangunan, dan Dinas Pendidikan
- Melakukan pendampingan IKM bagi satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan Kesetaraan di 11 Kabupaten (berbagi dengan BGP 11 Kabupaten).

3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]

- Mengadakan kegiatan penguatan fasilitator daerah untuk SDS agar paham tentang Arkas untuk membantu satuan pendidikan yang bermasalah
- Melaksanakan Bimtek di 22 Kabupaten/Kota agar satuan pendidikan yang belum siap salur ditindaklanjuti oleh Dinas dan Fasda di daerah masing-masing
- PIC BPMP memonitoring apabila ada permasalahan yang muncul terkait HPP SIPLah

4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]

- Pendamping Pemanfaatan TIK dari perwakilan Dinas Pendidikan serta menyusun program strategis dan eksekusinya akan berkolaborasi dengan komunitas belajar.id di tiap kab/kota

5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]

- Melaksanakan Webinar untuk membantu satuan pendidikan menyelesaikan permasalahan tentang rapor pendidikan
- Pendampingan secara rutin oleh fasda Kabupaten/Kota yang menjadi strategi kunci untuk mengejar akses agar capaian target diatas 95%
- Melakukan advokasi tindak lanjut serta pembimbingan kepada satuan pendidikan terutama



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

satuan pengimbas yang mana bisa berdampak untuk satuan pendidikan lain

6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - Melakukan penginputan hasil perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD)
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - Mengunjungi satuan pendidikan (sampel) untuk memastikan pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan prosedur
  - Menitipkan lembar tandatangan kepala dinas dan melakukan cap setelah itu dibawah kembali untuk dijilid laporan PPDB
  - Mengundang Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Tim TPPK Dinas Pendidikan untuk melakukan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah
8. PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Mengundang PIC AN Kab/Kota, Pengawas dan teknisi/proktor satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN tahun 2023 untuk memberikan pemahaman terkait AN
  - Untuk memastikan peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan kepala sekolah dalam keadaan siap untuk menjalankan AN serta kesiapan panitia yang terlibat seperti proktor/teknisi dan juga pengawas
9. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - Melakukan advokasi ke pemda terkait capaian renstra 2023 (AKS,APS, dan APK) serta terkait data ATS (Angka Tidak Sekolah)
10. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - Memberikan penguatan Literasi dan Numerasi melalui aksi nyata di komunitas belajar di satuan pendidikan
  - Koordinasi antara TIM Kampus mengajar, BPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ kota jarak dan lokasi di wilayah Nusa Tenggara Timur
  - Membentuk Komunitas Belajar Antar Satuan Pendidikan jenjang SD di Kota Kupang, Program Kerja, dan Jadwal Kegiatan
11. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - Berkoordinasi dengan PIC GSS Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk menginput hasil tes di Link Pelaksanaan Asesmen Kebugaran
  - Berkoordinasi dengan setiap sekolah Non Binaan untuk mengisi instrumen Asesmen Midline
  - Mengunjungi satuan pendidikan binaan GSS untuk memastikan pemenuhan 5 sehat
  - Memberikan pendampingan secara daring dan layanan konsultasi penulisan praktik baik GSS
12. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
  - Berkoordinasi dengan PIC Dinas Pendidikan kab/kota melalui wali wilayah untuk menginformasikan agar satuan pendidikan mengakses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusi (Dasar) melalui Pelatihan Mandiri di PMM
13. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
  - Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan Pendampingan kepada Satuan Pendidikan yang indeks pada entitas yang masih rendah/belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

## **[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

### **[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **Progress/Kegiatan**

1. SEIRAMA yang merupakan akronim dari “Senin Informasi, Refleksi Hasil Kerja Bersama” dilakukan secara Rutin setiap hari Senin diawali dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan SEIRAMA
2. Penyusunan Pengukuran Kinerja Triwulan II
3. Melakukan evaluasi mandiri SAKIP
4. Sharing session Mentoring dan Coaching SDM UPT BPMP Provinsi NTT tahun 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

### **Kendala/Permasalahan**

1. Belum semua ASN memahami tugas dari PDM 01 sampai dengan PDM 14
2. PIC setiap PDM belum memasukkan Laporan umum kegiatan yang sudah berjalan di Triwulan II
3. Menyiapkan data dukung evaluasi mandiri SAKIP melalui SPASIKITA
4. Untuk memahami pengertian coaching dan mentoring serta perbedaan utama antara keduanya untuk memaksimalkan potensi individu dan kelompok

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Semua ASN Wajib mengikuti SEIRAMA dengan materi penguatan tentang ZI-WBK, informasi terupdate undangan pusat serta informasi dari PMO
2. Mengisi link google drive Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2024
3. Melakukan Rapat Internal untuk menyiapkan data dukung SAKIP Tahun 2024
4. Menghadirkan Psikologi dari Yayasan Artikel Tiga Tiga Indonesia untuk mendampingi Katimker, Lead PDM, PIC dan Tim ZI-WBK melakukan Coaching dan mentoring bagi anggota kelompok

### **[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

### **[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

### **Progress/Kegiatan**

1. Rapat Rutin antara PMO dan PIC PDM setiap minggu ke satu dan ke ketiga setiap bulan untuk membahas kegiatan bulan berikutnya
2. Malaporkan capaian output di aplikasi SAKTI tepat waktu setiap bulan
3. LPJ Bendahara Pengeluaran tepat waktu setiap bulan

### **Kendala/Permasalahan**

1. Adanya blokir anggaran yang mempengaruhi penyerapan anggaran
2. Pelaksanaan kegiatan yang masih belum sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang telah disusun pada bulan sebelumnya sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal
3. Terdapat penambahan pagu anggaran pada akhir triwulan III (26 September 2024) sehingga menyebabkan penurunan penyerapan anggaran

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan evaluasi program kegiatan pada Minggu ke Satu dan Ketiga setiap bulan berjalan sehingga dapat diperoleh kegiatan yang tertunda dan alasan penundaan
2. Selalu melakukan pemantauan penyerapan anggaran terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak ada pertanggungjawaban kegiatan yang terlambat
3. PIC PDM berkomitmen terhadap jadwal program/kegiatan yang sudah disusun sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan Halaman III DIPA



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**


### C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7678	6110	1568	Rp17.384.952.000	Rp13.922.544.218	Rp3.462.407.782
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5916	6305	0	Rp379.840.000	Rp327.046.010	Rp52.793.990
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	Rp490.900.000	Rp475.305.726	Rp15.594.274
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	Rp18.006.234.000	Rp14.996.334.464	Rp3.009.899.536
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	Rp1.463.500.000	Rp7.400.000	Rp1.456.100.000
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	Rp1.788.613.000	Rp751.722.400	Rp1.036.890.600
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp39.524.039.000</b>	<b>Rp30.480.352.818</b>	<b>Rp9.043.686.182</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Kapasitas kinerja SDM seluruh ASN dan PPNPN di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap perlu ditingkatkan melalui SEIRAMA.
2. Koordinasi antara PMO, Katimker, PIC PDM dan Koordinator Wilayah harus tetap ditingkatkan dalam merencanakan jadwal dan melaksanakan program/kegiatan.
3. PIC PDM rutin melaporkan semua kegiatan yang akan dan telah dilakukan pada format yang telah disediakan melalui google drive dan PMO harus melakukan validasi terhadap laporan yang telah dibuat oleh PIC PDM.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kerjasama dengan Mitra Pembangunan dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga semua program/kegiatan bisa tercapai sesuai dengan objektif yang telah ditentukan.

Kupang, 1 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Penjaminan Mutu  
 Pendidikan Provinsi NTT  
 Herdiana



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





## Laporan Kinerja Triwulan 4 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

### A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	3.92	3.14
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35	%	35	43.47
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur</b>				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	95.55	Nilai	95.55	87.65

### B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

#### [SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

##### [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

#### Progress/Kegiatan

- 88,34 SD Negeri dan 90,41 % SD Swasta tidak menerapkan tes calistung saat PPDB
- 75,13 % Guru SD kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung (target 70 %)
- 57,50 % Satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi
- 61,18 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi (target 50%)
- 60,7 % PAUD dan melakukan penguatan pembelajaran pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari target 50%
- 71,1 % SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari target 70 %



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan secara daring kurang efektif karena terkendala cuaca dan jaringan menyebabkan info tidak tersampaikan dengan jelas sehingga masih ada 78 SD negeri yang terindikasi salah mengisi Link PPDB dan terbaca di dashboard melakukan tes Calistung meskipun sekolah tersebut sebenarnya tidak melakukan Tes calistung
2. Forum komunikasi belum berfungsi secara optimal, Tidak semua Satuan Pendidikan berkolaborasi dengan mitra pembangunan di daerahnya serta pengawas sekolah masih ada yang belum paham tentang perubahan pembelajaran dalam Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan (TPSDYM)
3. Tidak semua Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda Paud melakukan advokasi TPSDYM secara maksimal sehingga masih ada sekolah yang melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 3 hari tanpa melakukan Asesmen awal

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag serta Berkolaborasi dengan Mitra Pembangunan
2. Sosialisasi, advokasi dan bimtek dilakukan untuk memasifkan program Transisi PAUD-SD Yang Menyenangkan (TPSDYM) dan Mendampingi satuan Pendidikan dalam menerapkan TPSDYM

### [SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

## Progress/Kegiatan

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - 93% atau 88 satuan pendidikan PSP angkatan 1 mengalami peningkatan kondisi awal sekolah pelaksana PSP dan selanjutnya menjadi sekolah pengimbas secara luring; 88% satpen PSP angkatan 1 dan 2 mengalami peningkatan hasil AN pada Dimensi A (Kemampuan Literasi); 91% satpen PSP angkatan 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan skor rapor pendidikan pada Dimensi D (Kualitas Pembelajaran) dan E (Partisipasi Warga satpen); 93% atau 88 satpen PSP 1 menjadi penggerak transformasi pendidikan di daerahnya atau menjadi pengimbas program; 60% Satdik PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi pendidikan di daerahnya atau melaksanakan berbagi praktik baik secara mandiri
2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - 0,07% dari target 50% Guru memanfaatkan PMM untuk belajar dengan lebih sistematis; 73,68% Guru memanfaatkan perangkat ajar yang tersedia di PMM sebagai referensi oleh satuan pendidikan pelaksana IKM dengan indikator baik menjadi 75%; 87,50% Sekolah membudayakan kombel dan 69,48% fokus membahas permasalahan peserta didik dari target 75% Satuan Pendidikan Pelaksana IKM; 88,99% masyarakat atau orang tua memiliki persepsi yang positif terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - 66,01% penerima BOS dan 19,68% Penerima BOP sudah memahami pemanfaatan SIPLah dalam pengadaan Barang dan Jasa belum mencapai target 90% satuan pendidikan penerima BOS 50% satuan pendidikan penerima BOP; 80% dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan; 90% satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - 74,13% teraktivasinya Akun Belajar.id di satuan pendidikan menjadi 100% diluar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan; 97,87% dimanfaatkannya dengan maksimal perangkat Chromebook oleh satuan Pendidikan penerima bantuan TIK baik yang bersumber dari Bantuan Pusat maupun Bantuan DAK TIK dalam proses pembelajaran dari target 100%; 86,34% tingkat adopsi GWfE (Google Workspace for Education) di satuan Pendidikan dari



#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

target 100%

5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - 97% satuan pendidikan PAUD melakukan login dan unduh Rapor Pendidikan; 99% satuan pendidikan Dasmen (SD, SMP, SMA, SMK) melakukan login dan unduh Rapor Pendidikan 100% satuan pendidikan SLB, SKB dan 98% untuk PKBM yang melakukan login dan unduh Rapor Pendidikan Tahun 2024
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - 55,56% Pemda Provinsi merencanakan indikator prioritas SPM Pendidikan dari terget 70%, 12 Pemda Kab./Kota merencanakan 100% dan 10 Pemda merencanakan di bawah 100%; 3,65% Pemda Provinsi merencanakan Sub Indikator Prioritas SPM Pendidikan dari target 50%, 6 Pemda Kab./Kota merencanakan diatas target, 15 Pemda merencanakan di bawah target, dan 1 lainnya merencanakan jauh di bawah target;
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - 46% Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dari target 20% dan 10% Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi Pengawas Sekolah dari target 50% ditahun 2024; 95,65% pemda memiliki satgas PPKSP dari target 100% Pemda; 89,74% satuan pendidikan memiliki TPPK dan masih 1.427 Satpen belum memiliki TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)
8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Pemahaman stakeholder daerah meningkat untuk SD 99,13%, SMP 99,64%, SMA 99,81%, SMK 99,81% terhadap urgensi kebijakan AN dan Sulingjar; 75% Pemahaman guru dan siswa non formal meningkat terhadap urgensi Uji Kesetaraan dari target 30%; Menurunkan partisipasi satpen yang belum AN 81,81% atau 54 satpen dari target 50% dan Menurunkan partisipasi AN kurang tercapai 78,20% atau 122 satpen belum mencapai target 50%; Partisipasi Survei Lingkungan Belajar di bawah 100% tercapai target 48,14% atau 2.126 dari target 50%
9. [PDM-07\_Publikasi dan Media]
  - Gathering bersama media untuk menyampaikan program prioritas dari Kemdikdasmen dan Kumpul Komunitas yang melibatkan 30 komunitas di NTT
10. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - 7 Kabupaten/kota sudah mencapai target APS 7-15 tahun >99% dan 10 Kabupaten/kota yang sudah mencapai target APS 13-15 tahun >95%; 88,68% Angka Partisipasi Kasar untuk SMA/SMK/SMLB/MA Sederajat tidak mencapai target yaitu >95%;
11. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - 62,80% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran dari target 100%
12. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - 80% atau 96 sekolah binaan mengikuti asesmen endline Gerakan Sekolah Sehat; 70% atau 110 sekolah non binaan yang mengikuti asesmen akhir dari 133 sekolah di Provinsi NTT
13. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
  - 48% satuan pendidikan menjalankan pendidikan inklusif dari target 100%; 141% atau 6.666 guru mengikuti pendidikan berjenjang pendidikan inklusi (tingkat dasar) sudah melebihi target 4.743 guru
14. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
  - Indeks Kualitas Dapodik (IKD) Provinsi NTT 82.36% (NAIK), namun dari 22 Kab/Kota masih terdapat 6 Kabupaten (Kab. TTS, Kab. Belu, Kab.Malaka, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Timur dan Kab. sumba Tengah dengan Presentase Indeks Kualitas Dapodik (TURUN)

## Kendala/Permasalahan

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Pengawas Pendamping PSP masih perlu penguatan program dalam menganalisis hasil rapor pendidikan karena masih ada sekolah PSP yang belum bisa membaca Rapor Pendidikan
  - Belum bisa didapatkan regulasi keberlanjutan PSP, karena Pemda terwakili oleh tim PMO
  - Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, sarana dan prasarana serta anggaran



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

daerah untuk mendukung pembelajaran yang inovatif.

2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - Keterbatasan anggaran dan Fasilitator Daerah sehingga pendampingan IKM dengan skema mendampingi 100 sekolah per Kabupaten
  - Kegiatan Festival Kurikulum Merdeka yang terfokus di Kota Kupang sehingga di kabupaten lain diminta mengikuti secara daring melalui YouTube
  - Hanya ada sedikit mitra pembangunan yang memiliki program bersinggungan dengan IKM
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemda sehingga kurang penyedia lokal di SIPLah mengakibatkan harga masih mahal
  - Sekolah masih terbawa kebiasaan lama membuat perencanaan di tahun berjalan
  - SDM satuan pendidikan terutama PAUD yang tidak menguasai platform SIPLah serta terkendala masalah perangkat laptop
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - Peserta Didik yang belum mengetahui manfaat akun belajar.id sehingga tingkat aktivasi akun belajar tipe peserta didik adalah yang paling rendah.
  - Banyak sekolah penerima bantuan Chromebook yang memanfaatkan perangkat Chromebook hanya untuk pelaksanaan ANBK.
  - Ketersediaan layanan internet di daerah 3T masih menjadi kendala dalam pemerataan penerapan transformasi digital untuk Pembelajaran.
  - Banyak Pendidik yang belum tersosialisasi terkait penerapan Transformasi Digital untuk Pembelajaran.
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - 96 satpen belum unduh dan 106 satpen belum login dengan status tidak aktif dan aktif tidak memiliki akun belajar yang terdiri dari PAUD 80 satpen, SD 90 satpen, SMP 3 satpen, SMA 1 satpen, SMK 2 satpen, dan PKBM 1 satpen dari Jumlah 11.123 satpen
  - Belum adanya skema untuk menjawab objective "pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan" belum di informasikan ke BPMP
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
  - Pemda belum memahami secara baik tentang Rapor Pendidikan Daerah, dan Perencanaan Berbasis Data
  - Kebijakan Pimpinan Daerah (Bupati/DPRD) untuk menuntaskan visi misi saat kampanye politik hanya terfokus pada peningkatan APS melalui pembangunan fisik USB/RKB
  - Belum ada pendampingan bagi pejabat dan operator e-SPM, Biro/Bagian Pemerintahan Setda di Pemda provinsi dan kab./kota
7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
  - Karena masa transisi kepemimpinan sehingga Pemda masih belum untuk mengangkat GP menjadi KS
  - Masih Terdapat satpen yang menerima siswa melebihi daya tampung
  - Kekurangan SDM di Satpen jenjang PAUD sehingga menunggu SK gabungan gugus dari dinas pendidikan
8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
  - Sosialisasi tentang AN dan Sulingjar oleh Dinas Pendidikan kurang masif sehingga pemahaman tentang AN dan sulingjar masih kurang serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana
  - Masih ada satpen sudah tidak aktif kegiatan belajar mengajar tapi secara administrasi di DAPODIK terhitung aktif
9. [PDM-07\_Publikasi dan Media]
  - Kurangnya tim di PDM 07 BPMP NTT seperti tim foto/videografer, editing, pengelola media sosial, dan tim narasi dan kurasi sehingga PDM 07 tidak berjalan maksimal.
  - Penggunaan media sosial seperti Instagram dan tiktok bagi target audiens seperti masyarakat umum, pemangku kebijakan, dan tenaga pendidik di NTT kurang diminati sehingga ketersediaan informasinya tidak merata
  - belum terintegrasinya akun media sosial sehingga konten publikasi masih terpecah dan belum adanya pembaharuan profil BPMP NTT



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

10. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
  - Masih ada pemda yang belum mengetahui apa itu Anak Tidak Sekolah (ATS) dan berapa jumlah ATS di daerahnya sehingga menghambat pendampingan
  - Sosialisasi ke satuan pendidikan tentang ATS kurang maksimal karena undangan sosialisasi ke satuan pendidikan tidak tersampaikan serta terkendala jaringan yang tidak stabil
11. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
  - Jarak dan lokasi sekolah penugasan bagi mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 belum sesuai dengan domisili dari mahasiswa dan Belum terbentuknya Komunitas Belajar khusus Literasi dan Numerasi
12. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
  - Pendampingan secara daring kurang efektif karena peserta kurang antusias dan kurang perhatian pada saat pemaparan materi serta materi tidak tersampaikan dengan baik karena terganggunya jaringan internet
13. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
  - Sekolah inklusif belum mengakses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di PMM dan Keterbatasan sarana prasarana yang mendukung pendidikan inklusif
14. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
  - Terdapat Anomali dan Residu data pada 3 indikator penting dalam peningkatan Kualitas data yang memengaruhi Indeks Kualitas Dapodik dan Pergantian operator mempengaruhi kualitas pengisian data yang benar dan sesuai pada Dapodik

## Strategi/Tindak Lanjut

1. [PDM-01\_Program Sekolah Penggerak]
  - Meningkatkan olaborasi antara Tim PMO UPT dengan Disdik Kab/Kota/Provinsi untuk pelaksanaan pendampingan PSP antar BPMP dengan BGP serta dengan PDM lainnya
2. [PDM-02\_Implementasi Kurikulum Merdeka]
  - Melakukan Pendampingan IKM bagi Satuan Pendidikan dengan skema mencetak Fasilitator Daerah yang akan mengimbaskan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerah masing-masing, dan diberikan sertifikat. Dengan cara ini maka lebih banyak sekolah mendapatkan pendampingan
  - Puncak Festival Kurikulum Merdeka dilaksanakan di ruang publik (mall) sehingga mendapatkan perhatian banyak orang.
  - Kegiatan refleksi yang dilaksanakan dengan metode wawancara langsung kepada peserta yang sudah dikelompokkan berdasarkan jabatan dan peran.
3. [PDM-03A\_Transformasi Digital SDS]
  - Sasaran sekolah dalam kegiatan sosialisasi baik yang dilakukan dinas pendidikan maupun BPMP dimulai dari sekolah-sekolah yang bermasalah
  - Kolaborasi antar jenjang terutama bagi PAUD yang belum memiliki perangkat laptop utk ARKAS bisa dipinjamkan dari sekolah jenjang diatasnya dalam kecamatan yang sama
  - Melakukan webinar SIPLah dan Dana BOSP secara berkala dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Pengawas dan SIAR serta membentuk Fasda ARKAS dan SIPLah di tiap kabupaten/kota serta PIC per kecamatan
4. [PDM-03B\_Transformasi Digital untuk Pembelajaran]
  - Captain dan Co-Captain Belajar.id melakukan sosialisasi dan aktivasi bagi sekolah-sekolah yang ada di kab/kota masing-masing.
  - Komunitas belajar.id konsisten dalam mensosialisasikan dan mendampingi sekolah-sekolah dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.
  - PemanTIK (Pendamping Pemanfaatan TIK) yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berperan mendorong satuan pendidikan agar maksimal dalam menerapkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
5. [PDM-04A\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen]
  - Untuk satpen yang belum unduh di lakukan pendampingan di titik kecamatan bersama fasilitator daerah untuk membantu satpen yang terkendala akses akun belajar dan Melakukan webinar rutin secara daring untuk memberikan pemahaman dan penyamaan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- persepsi terkait akses dan pemanfaatan rapor sebagai dasar perencanaan
6. [PDM-04B\_Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik]
    - Berkoordinasi dan menjalin hubungan dengan Biro/Bidang Pemerintahan Setda provinsi dan kab./kota untuk mengawal realisasi SPM pendidikan sesuai perencanaan sebagai UPT Kementerian Pendidikan
    - Kegiatan Rakortek fokus pada peserta TPAD (Tim Perencanaan Anggaran Daerah) agar berdampak dan mendapatkan hasil yang maksimal
  7. [PDM-05\_Kemitraan Daerah dan Advokasi]
    - Melakukan Advokasi rutin kepada pemda terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah, PPDB dan PPKSP sebulan sekali secara daring
  8. [PDM-06\_Asesmen Nasional]
    - Partisipasi satpen yang tidak AN belum mencapai target sehingga Dinas pendidikan mendata permasalahan atau kendala yang dihadapi satpen untuk mencari solusi agar tahun 2025 bisa mengikuti AN
    - Mendata satpen yang tidak aktif selama 5 semester untuk di laporkan ke Pusdatin untuk di nonaktifkan dari Dapodik serta Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan tentang AN dan Sulingjar harus lebih masif sehingga satpen mendapatkan informasi terupdate
  9. [PDM-07\_Publikasi dan Media]
    - Tindak lanjut gathering media terdapat 20 media pers (dua media televisi, tiga media radio dan 15 media cetak dan on line) yang secara aktif mempublikasikan kegiatan atau berita terkait program prioritas kemdikdasmen
    - Tindak lanjut kegiatan kumpul komunitas adalah ada 2 PKS dengan komunitas lokal untuk meningkatkan literasi dan numerasi.
  10. [PDM-08\_Regulasi Tata Kelola]
    - Melakukan Sosialisasi ke satuan pendidikan dan pemda bahwa ada dashboard ATS yang harus di verval oleh OPS terkait data Dropout-dikeluarkan (DO), LTM (Lulus Tidak Melanjutkan) dan BPB (Belum Pernah Bersekolah) pada data ATS
  11. [PDM-10\_Pemulihan Pembelajaran]
    - Berkoordinasi bersama dengan PIC pemulihan pembelajaran dengan mengajak fasilitator daerah untuk melaksanakan aksi nyata penguatan literasi dan numerasi
  12. [PDM-11\_Gerakan Sekolah Sehat]
    - Menjalinkan Kolaborasi antara BPMP NTT, Dinas Pendidikan untuk peningkatan status kesehatan sekolah dan peserta didik dan Menyamakan persepsi antara sekolah, orangtua dan komite untuk perubahan positif perilaku hidup sehat di satuan pendidikan
  13. PDM-12\_Pendidikan Inklusi]
    - Pelatihan mandiri Pendidikan Berjenjang pendidikan inklusif (tingkat dasar) melalui PMM bukan hanya guru/tendik sekolah inklusif tetapi guru/tendik dari sekolah yang tidak ada siswa inklusifnya juga mengikuti pelatihan
  14. [PDM-14\_Analisis Data Pendidikan]
    - BPMP sebagai UPT Pusat yang menjadi mitra dari Dinas Pendidikan dapat melakukan pendampingan dan membantu Operator sekolah agar memahami dengan baik dan Benar terkait Kualitas Dapodik

**[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**  
**[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

**Progress/Kegiatan**

1. In House Training (IHT) Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Studi Tiru Praktik Baik di BBPMP Sulawesi Selatan, BBGP Sulawesi Selatan, BBPPMPV KPTK, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BPMP DKI Jakarta, BBPPMPV Seni dan Budaya, BPMP DI Yogyakarta, BGP DI Yogyakarta, BBPMP Jawa Tengah, BBGP Jawa Tengah, BBPPMPV BOE Malang, BBPMP Jawa Timur dan BBGP Jawa Timur
3. Pelatihan Dasar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (KP3L) bagi PPNP di Lingkungan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

BPMP Prov. NTT

4. Rapat Penyusunan Pengukuran Kinerja Triwulan IV untuk menggali informasi dan kelengkapan dokumen data dukung untuk mengetahui sejauh mana capaian IKK tahun 2024
5. Negotiation Skill Kepala UPT, Pertemuan Kombel Besar Kepala UPT PDM serta Berbagi Praktik Baik untuk Optimalisasi Pelayanan Lembaga melalui Komunitas Belajar bagi Kasubbag
6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi NTT tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan nilai 82,1 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 1,55 poin

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Komitmen bersama ASN dan PPNPN dalam pembangunan ZI-WBK masih kurang
2. IKK PAUD belum diperoleh hasil final karena baru terbit pada periode Januari 2025 sehingga menggunakan data BAN tahun 2023

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Komitmen lembaga untuk ASN dan PPNPN seperti IHT, Studi Tiru dan Pelatihan untuk PPNPN bertujuan agar menumbuhkan semangat dan meningkatkan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMP

#### **[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur**

#### **Progress/Kegiatan**

1. LPJ Bendahara Pengeluaran tepat waktu setiap bulan
2. Malaporkan capaian output di aplikasi SAKTI tepat waktu setiap bulan
3. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2023
4. Melakukan revisi anggaran terkait penyesuaian program dan update Halaman III Dipa untuk Triwulan IV tanggal 27 Desember 2024

#### **Kendala/Permasalahan**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) per 31 Desember 2024 sebesar 87,65 dari nilai EKA sebesar 76,59 dan nilai IKPA sebesar 98,70 membutuhkan 7,9 poin untuk mencapai target 95.55, Nilai Akhir dari NKA akan terbit pada bulan Januari 2025

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Operator dengan mengadakan pertemuan evaluasi, Memastikan penyerapan anggaran triwulan sudah sesuai target, Menggunakan UP dan TUP secara efektif dan Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dengan KPPN Kupang terkait pelaksanaan APBN

#### **C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7678	6260	1418	Rp17.384.952.000	Rp14.952.751.663	Rp2.432.200.337
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5916	6305	0	Rp379.840.000	Rp378.586.010	Rp1.253.990
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp490.900.000	Rp475.630.726	Rp15.269.274
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp18.006.234.000	Rp17.413.200.061	Rp593.033.939
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	Rp1.463.500.000	Rp1.023.174.134	Rp440.325.866
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	Rp1.788.613.000	Rp1.496.890.000	Rp291.723.000
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp39.524.039.000</b>	<b>Rp35.750.232.594</b>	<b>Rp3.773.806.406</b>

#### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Meningkatkan koordinasi kepada Stakeholder terkait (Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan) pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur
2. Seluruh pegawai (ASN dan PPNPN) BPMP Provinsi NTT bersinergi meningkatkan komitmen bersama dalam membangun ZI-WBK
3. Setiap PIC PDM membuat laporan yang menjabarkan data dan capaian sebagai acuan pembuatan Laporan Kinerja

Kupang, 31 Desember 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT
	Herdiana



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu  
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kupang, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Kolekta Bebhe Keu, S.Pd.,M.Hum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Alamat Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57a Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telepon (0380) 821149 dan 822910, Laman [www.bmpntt.kemdikbud.go.id](http://www.bmpntt.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0134 /C7.20/PR.04.03/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NTT**

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola BPMP Provinsi NTT yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik perlu dibentuknya TIM Penyusun Laporan Kinerja BPMP Provinsi NTT;
- c. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini di pandang cakap dan kompeten melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA- 138.04.2.693250/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NTT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah menghimpun data pendukung laporan kinerja tahun 2024;
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala BPMP Provinsi NTT;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPMP Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 138.04.2.693250/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 15 Januari 2025



Kepala  
Herdiana, S.T., M.B.A.

★ NIP. 197612062008101001

Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dasmien

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT

Nomor : 0134//C7.20/PR.05.01/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Herdiana, S.T.,M.B.A	Kepala	Pengarah
2	Dra. Damita Limbu, mm	Kasubbag Umum	Penanggung Jawab
3	Mulyono Burhan, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Perencanaan
4	Hafsyiah, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Perencanaan
5	Yupensia, S.Si	Pengolah Data dan Informasi	Perencanaan
6	Warsiyem, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	PDM-01
7	Basilius A.W. Wirawan, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi	PDM-02
8	Melki Ayub Pariakan, SE	Pengolah Data dan Informasi	PDM-03A
9	Milly Van Erich Saly, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi	PDM-03B / Keuangan
10	Muhammad Nasir	Pengolah Data dan Informasi	PDM-04A
11	Isak Bana, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	PDM-04B / Kepegawaian
12	Damianus Iku, S.Pd, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	PDM-05
13	Siti Maryam, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	PDM-06
14	Faizal Ismail Kasim, S.AB	Pengolah Data dan Informasi	PDM-07
15	Revina Riandini, S.Pd	Pengolah Data dan Informasi	PDM-08
16	Asnath O.E. Adoe, SE	Pengolah Data dan Informasi	PDM-09
17	Roswita M.E. Uly, S.Pd	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	PDM-10
18	Isyana R.M.A. Rupidara, SE	Pengolah Data dan Informasi	PDM-11
19	Bening Widihartanti, S.Pd	Pengolah Data dan Informasi	PDM-12
20	Erlyna Yustina Moa, S.Kom	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	PDM-14



Herdiana, S.T., M.B.A.

NIP. 197612062008101001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Alamat Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57a Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telepon (0380) 821149 dan 822910, Laman [www.bpmpntt.kemdikbud.go.id](http://www.bpmpntt.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0135/C7.20/PR.04.03/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NTT**

**Menimbang** : a. bahwa agar Laporan Kinerja yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara aknuntabel dan berkualitas dan memenuhi standar penyusunan laporan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Laporan Kinerja tahun 2024;  
c. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini di pandang cakap dan kompeten melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA- 138.04.2.693250/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NTT TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah melakukan penelaah atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang akurat dan berkualitas;
- KETIGA : Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala BPMP Provinsi NTT;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPMP Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 138.04.2.693250/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 15 Januari 2025



Herdiana, S.T., M.B.A.

NIP. 197612062008101001

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dasmen

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT

Nomor : 0135/C7.20/PR.05.01/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Herdiana, S.T.,M.B.A NIP. 197612062008101001 Pembina / IVa	Kepala	Pengarah
2	Dra. Damita Limbu, MM NIP. 196802272003122001 Pembina / IVa	Kasubbag Umum	Penanggung Jawab
3	Kolekta Bebhe Keu, S.Pd, M.Hum NIP. 197004182002122001 Pembina / IVa	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua SPI
4	Mulyono Burhan, SE NIP. 197101102001121002 Penata Tk.I/ IIIId	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota (Perencanaan)
5	Hafsyiah, S.Kom NIP. 198207112005012003 Penata /IIIc	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota (Perencanaan)
6	Yupensia, S.Si NIP. 197708022005012003 Penata Tk.I/ IIIId	Pengolah Data dan Informasi	Anggota (Perencanaan)



Herdiana, S.T., M.B.A.

★ NIP. 197612062008101001



**BPMP**  
**PROVINSI NTT**